

## CATATAN AKHIR TAHUN JIKALAHARI 2023



**Komitmen Ekologis  
3 Kandidat Capres:  
Masih Meragukan,  
Belum Ada yang Berani  
Melawan Korporasi**

## Komitmen Ekologis 3 Kandidat Capres: Masih Meragukan, Belum Ada yang Berani Melawan Korporasi

### I. Pendahuluan

Sepanjang 2023, terjadi fenomena El Nino—naiknya panas permukaan air laut yang akibatkan musim kemarau kering lebih lama dari musim penghujan—yang berdampak pada peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan, khususnya Riau. Berdampak pada hangusnya hutan dan lahan mencapai 6.990 ha, dan 33 ribu masyarakat terdampak infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Bencana penyerta lainnya pasca El Nino berlangsung juga terjadi. Lebih dari 5 ribu<sup>1</sup> rumah warga terdampak karena terjadi banjir di 12 kabupaten/kota di Riau—Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Dumai, Bengkalis, Siak, Pekanbaru, Meranti, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Konflik antara masyarakat dan perusahaan juga terjadi selama 2023 di antaranya antara masyarakat Desa Mumpa dan Teluk Jirah dengan PT Sumatera Riang Lestari, anak usaha APRIL Grup. Seperti tahun sebelumnya, konflik satwa juga tak absen dari Riau. Ditemukan terjadi penyerangan terhadap warga oleh Harimau di Siak dan Indragiri Hilir.

Di tengah El Nino yang terjadi, cuaca panas yang menerjang Indonesia, situasi politik yang memanas juga dihadirkan kepada masyarakat sejak pertengahan 2023 jelang Pemilu 2024. Tiap kandidat mempublikasikan rencana-rencana kerja mereka jika nantinya terpilih dan menyuarakan isu-isu strategis untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya terkait dengan isu ekologis.

Di tengah persoalan ekologis yang terjadi, tiap kandidat menyuarakan misi berkaitan dengan isu ekologis di antaranya:

1. Anies – Muhaimin, isu ekologis menjadi bagian dari Misi Ketiga yang mereka usung: *Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.*
2. Prabowo dan Gibran menjadikan isu lingkungan bagian dari Misi Kedua: *Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.*
3. Ganjar dan Mahfud meletakkan isu lingkungan sebagai bagian dari Misi Keenam: *Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi biru dan hijau.*

### **Dari misi yang diusung masing-masing kandidat capres dan cawapres ini, dapat menjawab persoalan ekologis yang terjadi di Indonesia, khususnya Riau?**

Jikalahari mencoba mendedah kesiapan dari setiap kandidat dalam merealisasikan janji-janji dalam visi – misi mereka. Akankah narasi-narasi yang dibangun tersebut hanya berupa kata-kata yang minim realisasi atau hal ini dapat menjadi solusi ataupun dari seluruh permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Jikalahari menganalisis tiap visi – misi berkaitan dengan isu ekologis dan disandingkan dengan fakta persoalan lingkungan yang ada saat ini.

<sup>1</sup> Rohul 2.644 rumah terendam (Kompas.com), Kampar 323 rumah (Media Center Kabupaten Kampar), Bengkalis 900 rumah (AntaraNews.com), Meranti 557 rumah (RiauPos), Pekanbaru 37 rumah (RRI.co.id)

Ada 4 parameter yang Jikalahari gunakan untuk analisis visi – misi kandidat capres dan cawapres di antaranya:

1. Keberanian dari kandidat untuk tegas menyatakan akan mencabut/ mereview perizinan perusahaan yang terlibat perusakan, pencemaran, perampasan hutan tanah masyarakat adat.
2. Mengembalikan hutan tanah masyarakat adat dan tempatan dan/atau memberikan akses ruang kelola kepada masyarakat berupa reforma agraria, perhutanan sosial hingga model-model kelola lainnya.
3. Meninjau ulang tata kelola Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) yang berkaitan dengan pembiayaan, sedapat mungkin meninjau ulang kredit-kredit Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) untuk korporasi.
4. Keberanian para kandidat untuk menghukum para taipan ataupun korporasi yang terlibat kejahatan berupa korupsi, pencucian uang, penggelapan pajak hingga pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan.

Catatan Jikalahari ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk dapat melihat dengan jelas, perihal isu ekologis telah menjadi isu prioritas untuk segera ditindaklanjuti, mengingat kondisi lingkungan yang semakin buruk akibat monopoli korporasi dan praktik industri yang buruk dan mengakibatkan percepatan perubahan iklim.

Karena generasi muda adalah kelompok yang paling terdampak dari hasil pemilu kali ini, tentunya, gagasan-gagasan pro ekologis akan sangat menjadi prioritas karena komitmen ini akan berdampak besar bagi lingkungan, hutan, flora dan fauna terutama masyarakat.

## II. Fakta Persoalan Ekologis di Riau

Jikalahari merangkum fakta dan temuan lapangan serta kebijakan pemerintah yang terjadi sepanjang 2023 terkait lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, khususnya di Riau.

### a. El Nino dan Karhutla

Pada 2023, Fenomena El Nino kembali terjadi di Riau. Polusi asap akibat karhutla menyebabkan kualitas udara di Pekanbaru berada di level “Tidak Sehat”, berdasarkan data Sipongi KLHK sepanjang 2023, luas karhutla di Riau mencapai 6.990 ha. Polusi asap ini mengakibatkan 31 ribu orang terpapar Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Riau merupakan salah satu provinsi yang selalu terdampak fenomena El Nino, saat El Nino 2015, kebakaran menghancurkan lahan seluas 183.808 ha (Data Sipongi KLHK) di Riau. Pantauan Jikalahari, karhutla juga mengakibatkan lima warga Riau meninggal akibat menghirup kabut asap, tiga anak kecil dan dua orang dewasa, sekitar 97.139 warga menderita penyakit: ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata, iritasi kulit. Karhutla juga mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp 20 triliun menurut catatan World Bank.

Lalu pada 2019, karhutla menghancurkan lahan seluas 90.550 ha (Data Sipongi KLHK), lebih 300 ribu orang terpapar penyakit ISPA, dan tiga orang diduga meninggal, tidak hanya itu, negara juga mengalami kerugian sekitar 50 triliun.

Hasil analisis citra satelit Terra Aqua- Modis dan Sentinel 2 menemukan 97 perusahaan HTI dan sawit yang tersebar di Riau, Jambi, Sumsel dan Kalteng diduga sebagai penyumbang polusi

asap karena memiliki hotspot dengan confidence lebih 50 persen. Dari 97 perusahaan, 20 merupakan perusahaan HTI, 2 Restorasi Ekosistem (RE) dan 75 perusahaan sawit.

Untuk memastikan karhutla di areal korporasi, pada Oktober 2023 Jikalahari melakukan investigasi ke areal konsesi PT Arara Abadi Distrik Nilo. Di lapangan tim menemukan; areal bekas terbakar seluas 5 hektar, kanal yang sudah dipenuhi rumput liar dan areal yang terbakar merupakan Semak belukar yang berbatasan dengan hutan alam. Berikut dokumentasi lapangan.



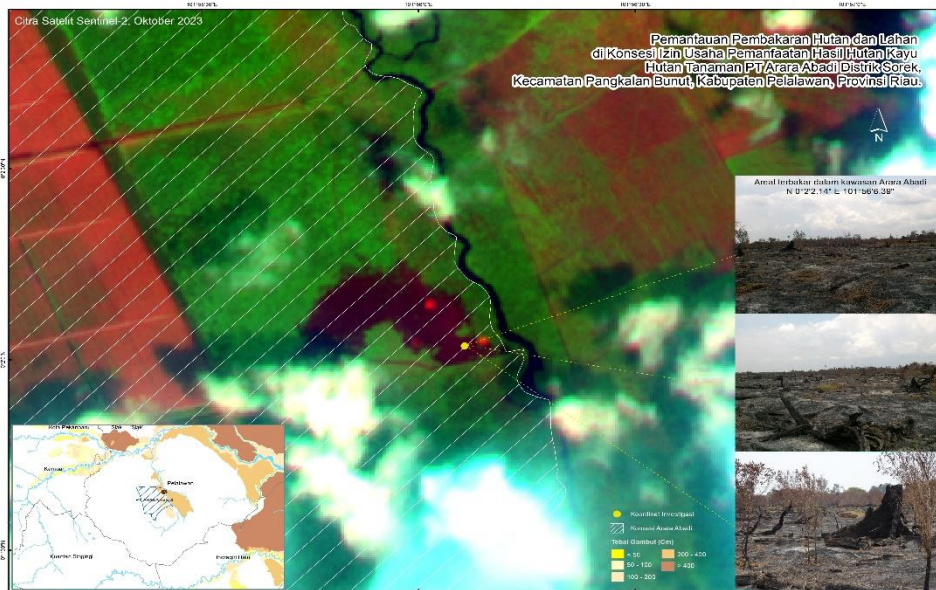
*Gambar 1. Areal bekas terbakar di Konsesi IUPHHK-HTI PT Arara Abadi (PT AA) Distrik Nilo diindikasikan pada kawasan lindung. Kondisi menunjukkan masih memiliki tutupan hutan alam. Gambar diambil pada titik koordinat N0°2'0.43" E101°56'8.97" Gambar diambil tanggal 28 Oktober 2023. Jikalahari 2023*



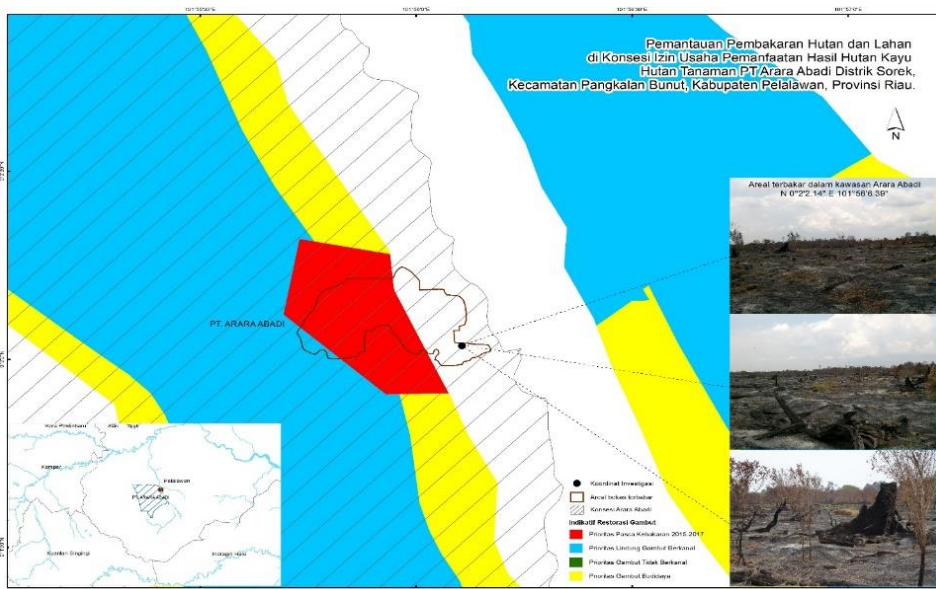
*Gambar 2. Areal bekas terbakar di Konsesi IUPHHK-HTI PT Arara Abadi (PT AA) Distrik Nilo diindikasikan pada kawasan lindung. Hamparan areal yang terbakar di dalam Kawasan lindung PT Arara Abadi. Gambar diambil pada titik koordinat N0°2'0.95" E101°56'8.45" Gambar diambil tanggal 28 Oktober 2023. Jikalahari 2023*



**Gambar 3 .** Kanal di Konsesi IUPHHK-HTI PT Arara Abadi (PT AA) Distrik Nilo diindikasikan pada kawasan lindung. Terlihat salah satu kanal yang berada di dekat lokasi kebakaran. Gambar diambil pada titik koordinat  $N 0^{\circ}2'0.30''$   $E 101^{\circ}56'10.00''$  Gambar diambil tanggal 28 Oktober 2023. Jikalahari 2023



**Gambar 4.** Temuan investigasi dioverlay dengan IUPHHK-HTI PT Arara Abadi (PT AA) Distrik Nilo.



**Gambar 5.** Hasil analisis GIS, Sebagian areal terbakar masuk dalam Peta Prioritas Restorasi Gambut 2015 - 2017, artinya areal ini pernah terbakar sebelumnya.

## b. Hotspot

Hasil analisis hotspot Jikalahari melalui satelit Terra Aqua Modis sepanjang 2003 – 2023 dengan confidence lebih 70% menemukan 33.371 titik hotspot berada di konsesi HTI dan 21.069 titik di Perkebunan sawit. Selengkapnya di tabel berikut.

**Tabel 1. Hotspot di Konsesi HTI**

No	Nama Perusahaan	Hotspot
	<b>APP &amp; Partners</b>	
1	EKS BHARA INDUK	163
2	EKS PRIMA BANGUN SUKSES	71
3	EKS RIMBA ROKAN PERKASA	1720
4	EKS RIMBA SERAYA UTAMA	86
5	PT. ARARA ABADI	3894
6	PT. ARTELINDO WIRATAMA	129
7	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	222
8	PT. BINA DAYA BENTALA	434
9	PT. BINA DAYA BINTARA	54
10	PT. BINA DUTA LAKSANA	101
11	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	1576
12	PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA	500
13	PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA & KTH WANA JA*	2
14	PT. INHIL HUTANI PRATAMA	416
15	PT. MITRA HUTANI JAYA	333
16	PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA	27
17	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	244
18	PT. RIAU ABADI LESTARI	102
19	PT. RIAU INDO AGROPALMA	23
20	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	28
21	PT. RUAS UTAMA JAYA	899
22	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	3755
23	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang)	6
24	PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung)	481
25	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	2275
26	PT. SUNTARA GAJA PATI	745
	<b>APRIL &amp; Partner</b>	
27	CV. ALAM LESTARI	3
28	CV. BHAKTI PRAJA MULIA	5
29	CV. MUTIARA LESTARI	6
30	CV. PUTRI LINDUNG BULAN	7
31	EKS BUKIT RAYA PELALAWAN	213
32	EKS HUTANI SOLA LESTARI	892
33	EKS LESTARI UNGGUL MAKMUR	77
34	EKS MERBAU PELALAWAN LESTARI	151
35	EKS PERKASA BARU	156
36	EKS RIMBA ROKAN LESTARI	758

37	EKS SARI HIJAU MUTIARA	326
38	EKS SIAK RAYA TIMBER	1067
39	KUD BINA JAYA LANGGAM	77
40	PT. BINA DAYA BINTARA	156
41	PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH	122
42	PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA	195
43	PT. EKA WANA LESTARI DHARMA	96
44	PT. MADUKORO	4
45	PT. MITRA KEMBANG SELARAS	30
46	PT. MITRA TANINUSA SEJATI	18
47	PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL	40
48	PT. NUSA WANA RAYA	183
49	PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR	267
50	PT. PERKASA BARU	80
51	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	2248
52	PT. RIAU BINA INSANI	67
53	PT. RIMBA LAZUARDI	177
54	PT. RIMBA MUTIARA PERMAI	38
55	PT. RIMBA PERANAP INDAH	93
56	PT. RIMBA ROKAN LESTARI	374
57	PT. SELARAS ABADI UTAMA	146
58	PT. SERAYA SUMBER LESTARI	422
59	PT. SUMATERA RIANG LESTARI	3022
60	PT. SUMATERA SILVA LESTARI	23
61	PT. SUMBER MASWANA LESTARI	86
62	PT. TRIOMAS FDI	266
63	PT. TRIOMAS FDII	3
64	PT. TUAH NEGERI	7
65	PT. UNI SERAYA	9
66	PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI	13
	<b>BARITO</b>	
67	PT. DIAMOND RAYA TIMBER	272
68	PT. THE BEST ONE UNI TIMBER	3
	<b>Non Grup</b>	
69	PT. KUARTET PUTRA MELAYU	187
70	PT. MULTI EKA JAYA TIMBER	389
71	PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA	30
72	PT. ROKAN PERMAI TIMBER	1703
73	PT. SINAR DELI PRATAMA	34
74	EKS NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCTS (HTI SAGU)	544

Tabel 2. Hotspot di Areal Perkebunan Kelapa Sawit

No	Nama Perusahaan	Hotspot
	<b>Adimulya Group</b>	
1	PT ADIMULYA AGROLESTARI	1
2	PT SURYA AGROLIKA REKSA	4
	<b>Asian Agri (RGE)</b>	
3	PT INTI INDO SAWIT	1
4	PT INTI INDO SAWIT SUBUR	71
5	PT MITRA UNGGUL PUSAKA	45
6	PT PUSAKA MEGAH BUMI NUSANTARA	39
7	PT RAJA GARUDA MAS SEJATI	183
8	PT RIGUNAS AGRI UTAMA	120
9	PT TUNGGAL YUNUS	2
10	PT WANASARI NUSANTARA	18
	<b>Astra Agro Lestari</b>	
11	PT Eka Dura Indonesia	226
12	PT EKADURA INDONESIA (I)	10
13	PT Kimia Tirta Utama	44
14	PT SARI LEMBAH SUBUR	62
15	PT SAWIT ASAHAN INDAH	12
16	PT Tunggal Perkasa Plantations	5
	<b>Danitama Makmur</b>	
17	PT GELORA SAWITA MAKMUR	132
	<b>Dumai Indah Group</b>	
18	PT DUMA INDAH PERKASA (B)	26
19	PT DUMAI INDAH PERKASA	4
20	PT INTI KAMPARINDO SEJAHTERA	59
	<b>Duta Palma Group</b>	
21	PT ADITYA PALMA NUSANTARA	74
22	PT BANYU BENING UTAMA	167
23	PT BERTUAH ANEKA YASA	261
24	PT CERENTI SUBUR	2
25	PT DUTA PALMA NUSANTARA	27
26	PT ELUAN MAHKOTA	39
27	PT JOHAN SENTOSA	4
28	PT KENCANA AMAL TANI	2
29	PT MEKARSARI ALAM LESTARI	143
30	PT MEKARSARI ALAM LESTARI (ADDENDUM)	101
31	PT PALMA SATU	1138
32	PT SRI ANUGRAH	23
33	PT WANA JINGGA TIMUR	9
	<b>First Resources</b>	
34	PT ARINDO TRISEJAHTERA	3
35	PT DUTA SWAKARSA	212
36	PT KARYA TAMA BAKTI MULYA	89

37	PT MERIDAN SEJATI SURYA	11
38	PT MURINI WOOD INDAH INDUSTRY	67
39	PT PERDANA INTI SAWIT	25
40	PT PERTISA TRADING COY LTD	1
41	PT PRIATAMA RIAU	78
42	PT SUBUR ARUM MAKMUR (I)	19
43	PT Surya Dumai Agrindo	1156
44	PT SURYA INTI SARI RAYA	38
	<b>Ganda</b>	
45	PT GANDA BUANINDA	2
46	PT Jatim Jaya Perkasa	248
	<b>Incasi Raya Group</b>	
47	PT Arvena Sepakat	23
48	PT SUMATERA MAKMUR	24
	<b>Klau River Ent., Sdn Bhd</b>	
49	PT LANGGAM INTI HIBRINDO	196
	<b>KLK</b>	
50	PT Adei Crumb Rubber I	26
51	PT SEKAR BUMI ALAM LESTARI	6
	<b>Lambang Tabung Hijau</b>	
52	PT TH Indo Plantations	383
	<b>Musim Mas</b>	
53	PT MUSIM MAS	22
	<b>Perkebunan Nusantara</b>	
54	PT PERKEBUNAN II (S. AIR BAYAS)	215
55	PT PERKEBUNAN II (S. AIR HITAM)	37
56	PT PERKEBUNAN II (SEI BUATAN)	32
57	PT PERKEBUNAN II (TANDUN)/PTPN V	3
58	PT PERKEBUNAN V	14
59	PT PERKEBUNAN V (NES / PIR AIR MOLEK)	39
60	PT PERKEBUNAN V (PIR BAGAN SINEMBAH)	1
61	PT PERKEBUNAN V (PIR LOKAL BAGAN BATU)	4
62	PT PERKEBUNAN V (PIR SEI. PAGAR)	44
63	PT Perkebunan V (PIR. Sei Siasam)	4
64	PT PERKEBUNAN V (S Rokan Kiri)	8
65	PT PERKEBUNAN V (SEI GALUH)	49
66	PT PERKEBUNAN V (SEI TAPUNG)	2
67	PT PERKEBUNAN V AIR MOLEK	1
68	PT Perkebunan V Sei Garo	3
69	PT Perkebunan VI	25
70	PT PERKEBUNAN VI/PT PADASA ENAM UTAMA	2
	<b>Rokan Group</b>	
71	PT ROKAN ADI MAKMUR	152
72	PT ROKAN ERA SUBUR	239
	<b>RP Kelapa Sawit Sdn Bhd</b>	
73	PT UDAYA LOH JINAWI	42

	<b>Sabira Group</b>	
74	PT SABIRA NEGERIUTAMA	68
	<b>Salim Group</b>	
75	PT Cibaliung Tunggal Plantations	8
76	PT Gunung Mas Raya (Sungai Rumbia 1 and 2 estate)	133
77	PT SERIKAT PUTRA II	6
	<b>Sambu Group</b>	
78	PT GUNTUNG HASRAT MAKMUR	2001
	<b>Samsung</b>	
79	PT GANDAERAH HENDANA	83
80	PT INECDA	15
81	PT INECDA (HGU)	28
82	PT INECDA (I)	1
	<b>Sarimas Group</b>	
83	PT TRIBAKTI SARI MAS	57
	<b>Siak Raya Group</b>	
84	PT PEPUTRA SUPRA JAYA	120
85	PT SIAK SERAYA	224
	<b>Sime Darby</b>	
86	PT ANEKA INTI PERSADA	18
87	PT Bumi Reksa Nusasejati	112
88	PT LAHAN TANI SAKTI	10
89	PT TUNGGAL MITRA PLANTATION (I)	14
90	PT TUNGGAL MITRA PLANTATION (II)	9
	<b>Sinar Mas (GAR Plasma)</b>	
91	KKPA PT Mega Nusa Inti Sawit	19
	<b>Sinar Mas (GAR)</b>	
92	PT BUANA WIRA LESTARI	2
93	PT Buana Wiralestari Mas	2
94	PT Bumi Palma Lestari Persada	5
95	PT Ivo Mas Tunggal	2
96	PT IVO MAS TUNGGAL (I)	1
97	PT Meganusa Intisawit	12
98	PT Ramajaya Pramukti	3
99	PT RAMAJAYA PRAMUKTI (III/. S.TIBUN)	7
100	PT RAMAJAYA PRAMUKTI I (Bangkinang))	2
	<b>Torganda</b>	
101	PT TORGANDA	7
	<b>Uniseraya</b>	
102	PT UNI SERAYA	139
	<b>Wilmar</b>	
103	PT CITRA RIAU SARANA	22
104	PT DHARMA WUNGU GUNA	35
	<b>Non Grup</b>	
105	BPP Sei Putih	6
106	CV Lubuk Muda Raya	3

107	CV Nirmala	261
108	CV Radita	69
109	CV Riau Merbau Lestari	47
110	PT Abdi Budi Mulya	9
111	PT Adei Crumb Rubber	61
112	PT AGRI PRIMA	89
113	PT AGRITA SARI PRIMA	24
114	PT AGRO CITRA MULIA	7
115	PT AGRO SARIMAS INDONESIA	459
116	PT Agroraya Gematrans	411
117	PT ALAM SARI LESTARI	324
118	PT ALFA GLORY	7
119	PT ALFA GLORY INDAH/PT MUSTIKA AGROSARI	28
120	PT ANUGERAH KARYA LESTARI	112
121	PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO (LOKASI A)	67
122	PT ANUGERAH NIAGA SAWINDO (LOKASI B)	19
123	PT ARIAN MULTI KAWA	130
124	PT AZEK SAKTI	35
125	PT BARITO RIAU JAYA	15
126	PT BASKARASATRIATAMA RIAU	132
127	PT BATU PUTIH	17
128	PT BENGKALIS KAMPAR SARANA	3
129	PT BINA FITRI JAYA	1
130	PT BINA RUPAT SEPANG LESTARI	63
131	PT BINTANG RIAU SEJAHTERA	52
132	PT BUDIDAKSA DWI KUSUMA	998
133	PT BUMI DAYA PLANTATION	60
134	PT CEMERLANG GUNUNG LINTAS LAUTAN	14
135	PT CEMPAKA AGRO LESTARI	37
136	PT CIPTA DAYA SEJATI LUHUR	3
137	PT DARMALI JAYA LESTARI	35
138	PT DUET RIJA	263
139	PT EGASUTI NASAKTI	1
140	PT EGASUTI NASAKTI I (BLOK B)	1
141	PT EKADAYA SEJATI SUKSES	5
142	PT GUNTUNG IDAMAN NUSA	109
143	PT HAMPARAN HIJAU	43
144	PT HUTAHAEAN	1
145	PT INHUWANA PALMA LESTARI	34
146	PT JALUR PUSAKA SAKTI KUMALA	4
147	PT KARYA PROJA NELAYAN	2
148	PT KARYABADI SAMASEJATI	2
149	PT KARYATAMA BAKTI MULIA	91
150	PT KEBUN PANTAI RAJA	17
151	PT KHARISMA RIAU SENTOSA PRIMA	106
152	PT KILAU KEMUNING	402

153	PT KOKONAKO INDONESIA	17
154	PT KOSTA PALMIRA	51
155	PT KURNIA MAS	39
156	PT MANDIRI ABADI SEJAHTERA	29
157	PT MARITA MAKMUR JAYA	325
158	PT MESKOM AGRO SARIMAS	267
159	PT NUSAESA BINA	10
160	PT PADASA ENAM UTAMA	56
161	PT PANCA AGRO LESTARI	25
162	PT PARAWIRA ABADITAMA	4
163	PT PARAWIRA PRIMAKONSIER	2
164	PT PARAWIRA UTAMA	1
165	PT PERKEBUNAN BINTAN	8
166	PT PERMATA SAWIT PERMAI	27
167	PT POLITANI KATULISTIWA	2
168	PT RANTAU BAIS FAMILI	119
169	PT RIAU SAKTI TRANSMANDIRI	386
170	PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS	47
171	PT ROKAN ADI RAYA	413
172	PT SAFARI RIAU	61
173	PT SAKTI SAWIT JAYA	132
174	PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI	243
175	PT SARPINDOGRAHA SAWIT TANI (KELOMPOK B)	82
176	PT SATTRIA WINDU SERAYA	1
177	PT SAWIT ROKAN SEMESTA	41
178	PT SAWIT UNGGUL PRIMA PLANTATIONS	3
179	PT SIDOMARGA PERKASA	1
180	PT SINAR MITRA NAWA SIAGA	1
181	PT SINAR SAWIT SEJAHTERA	210
182	PT SINDORA SERAYA (BLOK I)	366
183	PT SINDORA SERAYA (BLOK II)	1
184	PT SUMBER JAYA INDAH NUSA COY	43
185	PT SUMBER MUTIRA INDAH PERSADA	12
186	PT SUMBER SAWIT SEJAHTERA	214
187	PT SUNTAI JAYA SATTRIA	44
188	PT SURYA BRATASENA PLANTATION	80
189	PT SURYA BUANA BERSAMA	241
190	PT SURYA KERITANG PERKASA	13
191	PT TANI SUBUR MAKMUR	56
192	PT TANI SWADAYA PERDANA	36
193	PT TANJUNG BUNGA SELATAN	1
194	PT TASMA PUJA	1
195	PT TEGUH KARSAWANA LESTARI	161
196	PT TESO INDAH	93
197	PT TESSO SEPAKAT	36
198	PT TOBA INDAH	51

199	PT TRI BAKTI SARIMAS	65
200	PT TRI HASTA PALMA	8
201	PT TRIDAYARI MANDIRI UTAMA	435
202	PT TRIOMAS FDI	249
203	PT TRISETYA USAHA MANDIRI	594
204	PT TUMPUAN	39
205	PT UNICO BIMASARI	128
206	PT WANA SUBUR SAWIT INDAH	45
207	PT WASUNDARI INDAH	2
208	PT Yutani Suadiri	1

### c. Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK)

Jikalahari melakukan analisis terhadap pendanaan yang diberikan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) Indonesia maupun luar negeri terhadap grup-grup besar di sektor pulp dan kertas serta sawit sepanjang 11 tahun (2011 – 2022).

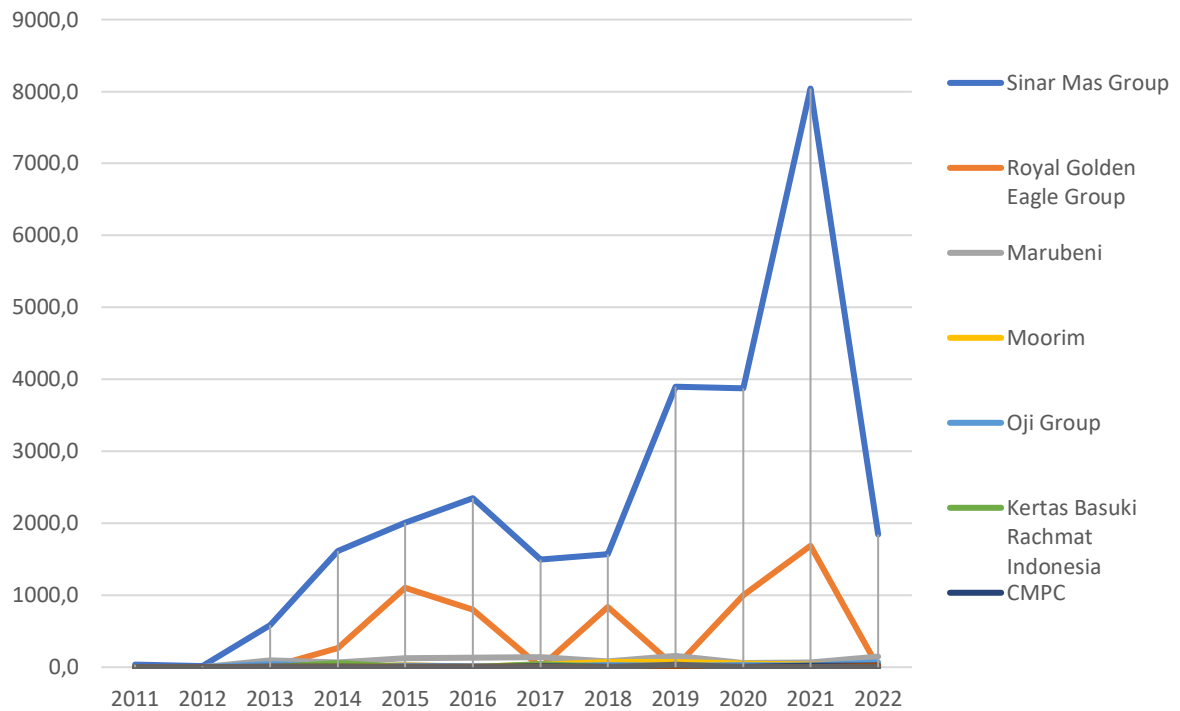
Dari Forest and Finance, ditemukan total pendanaan yang diterima 9 grup besar sektor pulp dan kertas selama 12 tahun mencapai USD 34,9 miliar atau setara dengan Rp 544 triliun (1 USD=Rp 15.000). Pendanaan yang diterima ini berupa investasi (*share holdings dan share issuance*) dan pinjaman (*revolving credit facility, corporate loan, bond issuance dan bond holding*) yang diberikan PUSK kepada perusahaan.

Dari total pembiayaan yang diterima, 78% di antaranya mengalir untuk Sinar Mas Group, 16% untuk RGE, Marubeni menerima 3% dan untuk 1% mengalir kepada Moorim, OJI Group dan Kertas Basuki Rachmat Indonesia dan sisanya tidak sampai 1 persen untuk CMPC, Itochu dan Perkebunan Nusantara Group.

**Tabel 3. Rincian pendanaan yang diterima masing-masing grup pulp dan kertas di Indonesia**

Group	Total (Juta USD)	Total IDR (Triliun)
Sinar Mas Group	\$ 27.338	410
Royal Golden Eagle Group	\$ 5.688	85,3
Marubeni	\$ 1.061	15,9
Moorim	\$ 320	4,8
Oji Group	\$ 267	4
Kertas Basuki Rachmat Indonesia	\$ 102	1,53
CMPC	\$ 91	1,37
Itochu	\$ 53	0,79
Perkebunan Nusantara Group	\$ 34	0,51
<b>Total</b>	<b>\$ 34.955</b>	<b>524,3</b>

Pendanaan yang diterima 9 grup besar pulp dan kertas fluktuatif namun cenderung meningkat dikala kasus lingkungan banyak terjadi, terutama pada 2014-2016 serta 2019, kala karhutla besar terjadi di Indonesia.



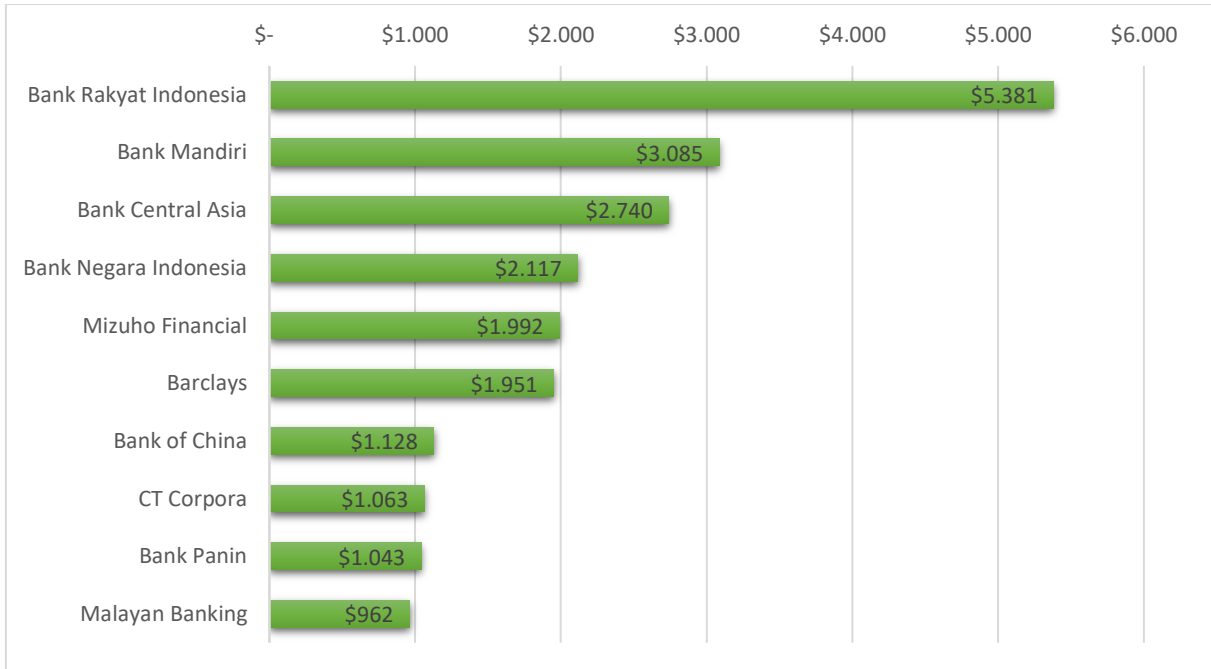
Indonesia juga menjadi negara asal PUSK yang banyak memberikan bantuan pendanaan ke grup Perusahaan pulp dan kertas ini. Sekitar USD 19 miliar atau setara Rp 297 triliun dana bersumber dari PUSK di Indonesia.

Ini dapat terlihat dari perbandingan PUSK yang terbanyak memberikan pendanaan kepada grup pulp dan kertas yang didominasi berasal dari Indonesia dengan perbandingan 6:4.

Untuk 10 kreditur terbesar diantaranya: BRI, Mandiri, BCA, BNI, CT Corpora dan Panin Bank. Berikut grafik 10 kreditur terbesar sektor pulp dan kertas (dalam juta USD).

### 10 NEGARA PEMBERI DANA TERTINGGI KEPADA GRUP HTI PERIODE 2011 - 2022



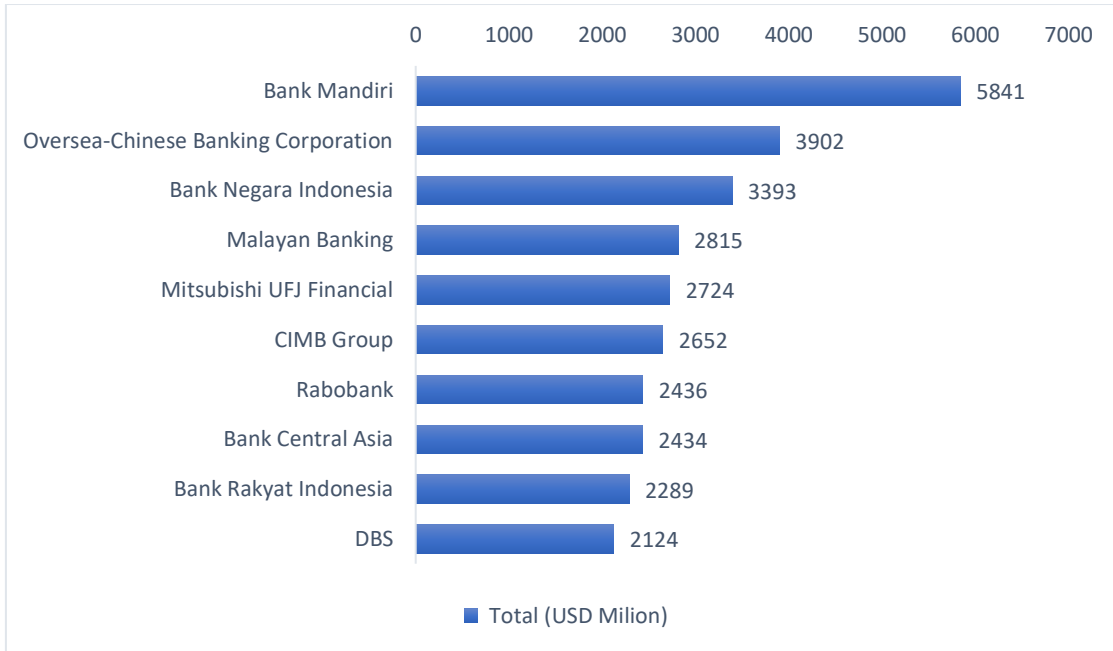


Untuk sektor perkebunan kelapa sawit, data dari *Forest and Finance*, terdapat 66 grup besar yang beraktifitas di Indonesia. Total pendanaan yang diterima oleh grup sektor sawit ini mencapai USD 65 miliar atau setara dengan Rp 976,2 miliar.

Total pendanaan ini 16% diberikan kepada Sinar Mas Group, Salim Group menerima 10%, Perkebunan Nusantara Group dan Jardine Matheson Group 6%, COFCO, Wilmar, dan Rajawali Group menerima 5% dari total pendanaan. Sedangkan group lainnya seperti Archer Daniels Midland, Triputra Group, Sungai Budi Group menerima 3%.

Selain 10 grup besar diatas, masih terdapat 56 grup lainnya yang menerima pendanaan 0,0001 – 2% dari total pendanaan seperti grup Batu Kawan, RGE, Austindo, Tanjung Lingga, Harita, Sampoerna, Sime Darby Plantations, Musim Mas, Bakrie, LG, Samsung, TH Group, Rajawali Nusantara Indonesia, Barito Pacific, Olam International, Surya Dumai, Cargill, Bunge, Genting Group, Provident Agro, MP Evans, POSCO, TPS Group, Gozco, ZTE, Itochu, DSN, TSH Resources, Charoen Pokphand, Sipef, Permata Hijau, Louis Dreyfus Company, IOI Group, PTT Group, R E A Holdings, IJM, Johor serta Anglo-Easterns Group dan 18 grup lainnya.

Untuk sektor sawit, PUSK yang memberikan pendanaan terbanyak, dominan berasal dari luar Indonesia dengan perbandingan 6:4 untuk 10 kreditur terbesar diantaranya: BRI, BCA, BNI dan Mandiri, sisanya berasal dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Belanda dan Jepang. Berikut grafik 10 kreditur terbesar sektor sawit (dalam juta USD).



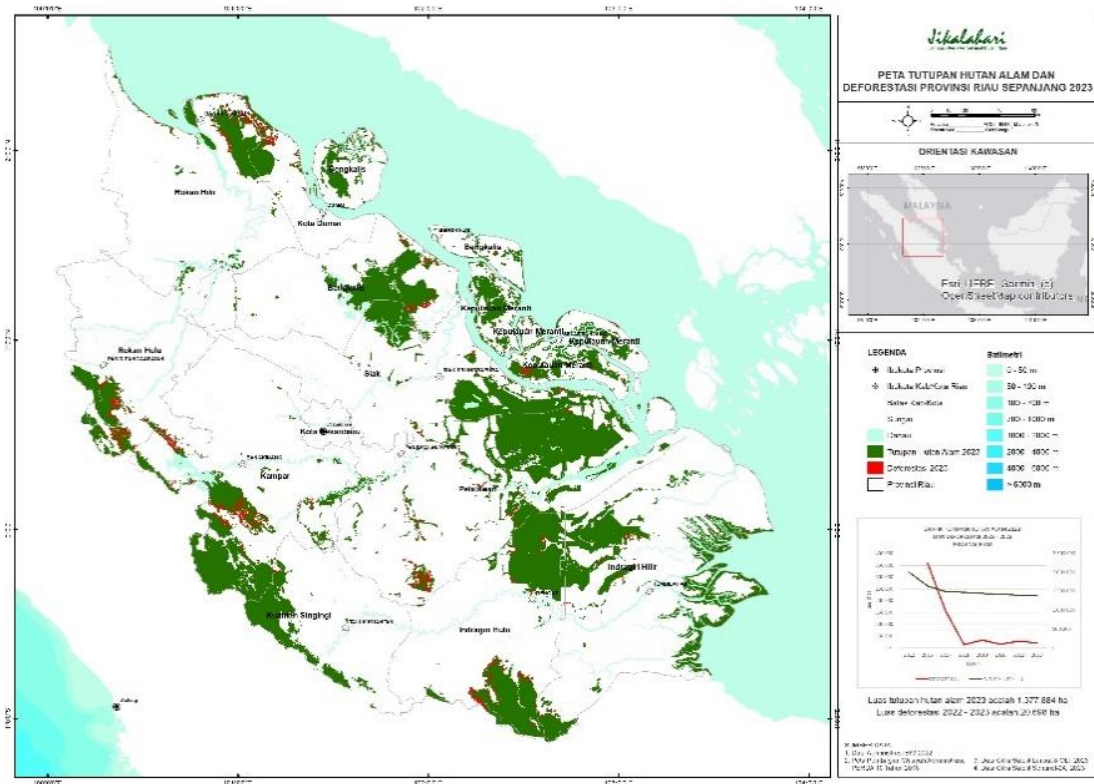
Walaupun hanya ada 4 dari 10 besar PUSK tertinggi yang memberikan pendanaan kepada grup sawit, namun pendanaan tertinggi yang diberikan berasal dari Indonesia. Selain Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang juga termasuk negara tertinggi yang memberikan pendanaan dengan total pendanaan melebihi USD 6 miliar atau lebih dari Rpp 100 triliun untuk industri perkebunan sawit ini.

**Tabel 4. Daftar total pembiayaan tertinggi dari 10 negara**

No	Negara	Total (Juta USD)	Total IDR (Triliun)
1	Indonesia	1820,3	Rp 273,1
2	Malaysia	8583,3	Rp 128,8
3	Singapore	7206,9	Rp 108,1
4	Japan	6856,7	Rp 102,9
5	United States	5623,1	Rp 84,4
6	China	3454,2	Rp 51,8
7	Netherlands	3275,6	Rp 49
8	United Kingdom	2719,3	Rp 40,8
9	Taiwan	1702,6	Rp 25,5
10	France	1439,8	Rp 21,6

#### d. Deforestasi

Jikalahari melakukan pemantauan bukaan tutupan hutan alam tersisa di Riau sepanjang 2023 melalui citra satelit Sentinel-2. Dari hasil analisis menemukan terjadi peningkatan bukaan tutupan hutan mencapai 69,52% pada 2023 dibandingkan pada rata-rata bukaan di tahun 2020 hingga 2022. Ini menunjukkan peningkatan deforestasi sehingga tutupan hutan berkurang dari 1.398.582 ha menjadi 1.377.884 ha.



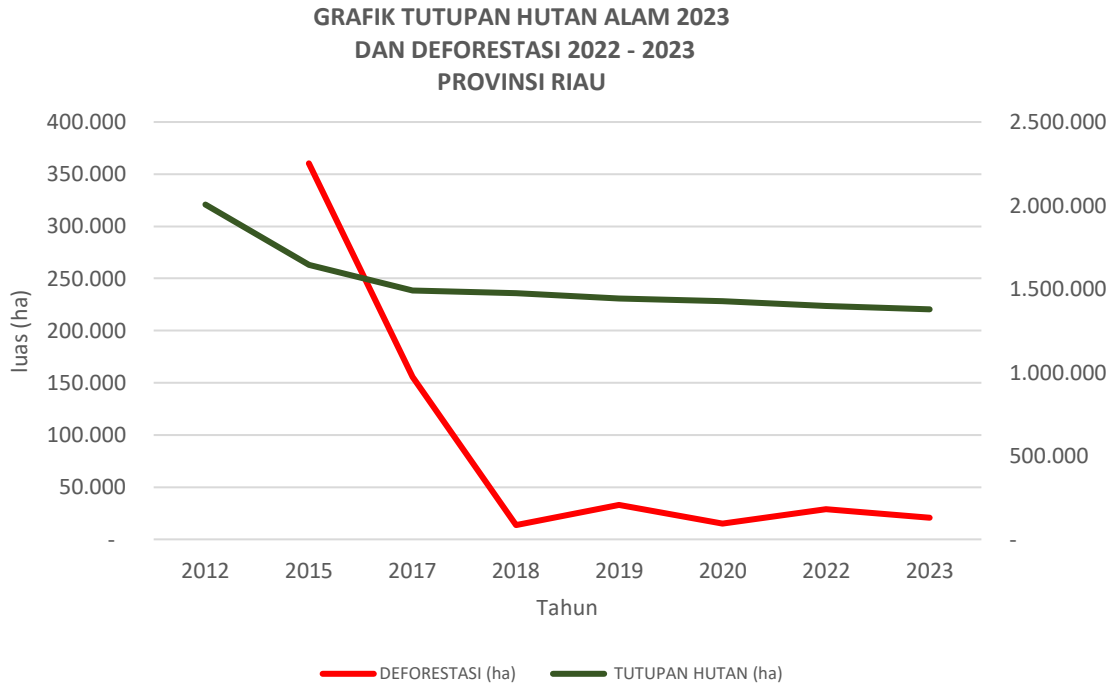
Gambar Peta Tutupan Hutan Alam Tersisa di Riau pada 2023

Dari hasil analisis ini, Jikalahari menyimpulkan bahwa sepanjang 2023, Riau telah kehilangan hutannya seluas 20.698 ha dan pengurangan ini terjadi 6.049 ha di areal yang dibebani izin HTI, 1.450 ha pada areal perkebunan sawit, sekitar 4.757 ha di areal konservasi, serta sisanya berada di kawasan lainnya.

Tabel 5. Series Data Deforestasi di Riau Sepanjang 4 Dekade Terakhir

SERIES	DEFORESTASI	DURASI	DEF/TH
1982 - 2002	3.347.218	20	167.361
2002 - 2004	261.705	2	130.852
2004 - 2005	158.513	1	158.513
2005 - 2007	375.539	2	187.769
2007 - 2009	183.295	2	91.648
2009 - 2012	395.711	3	131.904
2012 - 2015	360.359	3	120.120
2015 - 2017	155.796	3	51.932
2017 - 2018	13.669	1	13.669
2018 - 2019	33.072	1	33.072
2019 - 2020	15.306	1	15.306
2020 - 2022	28.781	2	14.390
2022 - 2023	20.698	1	20.698

Jika dipersentasekan maka deforestasi pada kawasan HTI memiliki persentase yang paling besar di antara perkebunan sawit ataupun kawasan konservasi yaitu sekitar 29,23%. Kawasan konservasi menduduki peringkat persentase kedua terbesar setelah deforestasi HTI sekitar 22,98%.



*Grafik Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Sepanjang 1 Dekade Terakhir*

**Tabel 6. Luas deforestasi di 12 Kabupaten/ Kota di Riau sepanjang 2023**

Kabupaten	TUTUPAN HUTAN ALAM 2023	DEFORESTASI 2022 - 2023
Pelalawan	229.287	3.024
Indragiri Hulu	207.049	2.062
Indragiri Hilir	205.937	832
Kampar	171.110	4.901
Siak	142.261	961
Bengkalis	110.944	1.497
Kepulauan Meranti	88.231	788
Kuantan Singingi	72.915	217
Rokan Hilir	67.325	2.052
Rokan Hulu	58.335	3.243
Kota Dumai	24.490	1.122
<b>Grand Total</b>	<b>1.377.884</b>	<b>20.698</b>

#### e. Banjir

Ada beberapa bencana di Riau, di awal tahun 2023 masyarakat di Provinsi Riau sudah di resahkan dengan adanya bencana kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap, selain bencana karhutla, di penghujung tahun 2023, intensitas hujan di Riau tinggi yang menyebabkan banjir.

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7743/XII/2023

tentang Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau tahun 2023 sejak 22 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024.

Berdasarkan pemantauan Jikalahari sepanjang 2023 seluruh kabupaten/kota di Riau terdampak banjir.

Dari seluruh daerah di Riau, Rokan Hulu menjadi kabupaten paling parah terdampak banjir, terutama di desa Babusalam, Pasir Pengaraian, Pematang Berangan, Rokan IV Koto, Bonai, dan Tambusai. Hal tersebut menyebabkan sebanyak 2644 rumah warga terendam banjir. Banjir mencapai ketinggian air 2,5 meter.

Kemudian Banjir di kabupaten Bengkalis menyebabkan 900 unit rumah warga yang berasal dari lima desa terendam banjir. Lima desa tersebut terdapat di Kecamatan Bantan yakni Desa Bantan Air terdampak 230 KK, Teluk Papal 186 KK, Desa Bantan Tengah 260 KK, Bantan Sari 136 KK, Ulu Pulau 111 KK.<sup>2</sup>

Banjir juga merendam beberapa wilayah di Kabupaten Kuantang Singingi, berdasarkan laporan BPBD Kuantan Singingi, banjir menggenangi Desa Petapahan, dan Gunung Toar, ketinggian banjir di Gunung Toar mencapai 1 meter dan merendam pemukiman warga sebanyak 180 rumah, 3 mushala, 1 SMAN Gunung Toar, dan 1 SMP Satu Atap.<sup>3</sup>

Banjir di Rokan Hilir merendam sebanyak 247 rumah warga di Kepenghuluan Sei Kapas, Kecamatan Rantau Kopar, ketinggian banjir di permukiman warga mencapai 35 sentimeter hingga 1 meter. Banjir sudah berlangsung selama sebulan di Dusun Pematang Meranti sebanyak 152 rumah, sedangkan di Dusun Terusan 90 rumah.<sup>4</sup>

Banjir juga terjadi di Kabupaten Kampar dengan ketinggian air mencapai 30-50 centimeter, banjir terbesar melanda Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar yang mengakibatkan setidaknya 553 KK atau sekitar 1661 jiwa terdampak dan mengakibatkan 323 rumah warga terendam banjir.<sup>5</sup>

Banjir salah satu bencana yang kerap terjadi menjelang penghabisan tahun dan ini selalu menjadi pekerjaan rumah awal tahun 2024 yang mesti di selesaikan.

#### f. Konflik Satwa

Konflik satwa dan manusia masih terjadi di Riau. Pertama, pada April 2023, Andi Sukerman, warga Kelurahan Kampung Rempa, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tewas diterkam harimau di kebunnya saat memanen getah dan sawit. Kedua, pada Mei 2023, Arbain, warga Desa Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir tewas diterkam Harimau Sumatera saat menggesek kayu di hutan.

Selain konflik satwa dan manusia, kasus gajah mati diracun juga masih terjadi sepanjang 2023. Yang terbaru pada November 2023, seekor anak gajah mati terjerat di Pelalawan, lalu pada Juli 2023 seekor gajah juga mati di racun di Pelalawan. Sebelumnya pada 2016, seekor gajah betina umur 25 tahun mati dalam kubangan air di Distrik II Duri. Pada November 2019, seekor gajah jantan umur 40 tahun mati dengan kepala terpisah dari badannya di konsesi PT Arara Abadi Distrik II Duri.

<sup>2</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3850659/kapolda-riau-perintahkan-bantu-923-kk-terdampak-banjir-di-bengkalis>

<sup>3</sup> <https://mediacenter.riau.go.id/read/82944/sejumlah-wilayah-di-kuansing-terendam-banjir.html>

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2023/12/08/060400678/sudah-sebulan-247-rumah-di-rokan-hilir-terendam-banjir-warga-dievakuasi>

<sup>5</sup> <https://www.batamnews.co.id/berita-107864-553-keluarga-terdampak-banjir-di-desa-buluh-cina-kampar.html>

### g. 15 Tahun SP3 Korupsi Kehutanan

Desember 2023, tepat 15 tahun pasca terbit SP3 20 korporasi korupsi kehutanan di Riau. Dua puluh korporasi tersebut adalah APRIL Grup (PT Selaras Abadi Utama, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Seraya Sumber Lestari PT Triomas FDI, PT Madukoro, CV Alam Lestari, CV Buah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, CV Harapan Jaya, CV Bhakti Praja Mulia dan CV Mutiara Lestari PT National Timber and Forest Product) dan APP Grup (PT Satria Perkasa Agung, PT Bina Daya Bintara, PT Mitra Hutani Jaya, PT Balai Kayang Mandiri, PT Rimba Mandau Lestari).

Dua puluh korporasi ini disebutkan dalam proses persidangan Azmun Jaafar, Arwin AS (Siak), tiga kepala dinas kehutanan, serta Rusli Zainal. Atas korupsi yang dilakukan para terpidana menerbitkan IUPHHK-HT serta mengesahkan RKT di atas hutan alam telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan kedua puluh korporasi tersebut sebesar Rp 1,3 triliun.

### h. Kasus Surya Darmadi

Pada 23 Februari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menghukum Surya Darmadi penjara 15 tahun, denda Rp 1 miliar dan pidana tambahan Rp 2,24 triliun dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,75 triliun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam perkara sawit dalam kawasan hutan.

Lalu, Surya Darmadi melakukan Kasasi dan dikabulkan oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana yang menghilangkan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 Triliun dalam perkara Surya Darmadi. Ketiganya merubah putusan, hanya menghukum pemilik PT Darmex Grup ini dengan 16 tahun penjara dan bayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,2 Triliun.

Hanya 11 hari waktu yang diperlukan Majelis Hakim MA memutus perkara kasasi Surya Darmadi. Padahal perkara ini rumit dan butuh kehati-hatian dalam penerapan hukum oleh Hakim MA. Bila dibanding dengan perkara kasasi korupsi Suheri Terta, ini perlakuan khusus hakim kasasi MA terhadap Surya Darmadi.

### i. Lambannya Realisasi Perhutanan Sosial

Catatan Jikalahari, hingga Desember 2023, capaian PS di Riau seluas 160.944,34 ha, yang terbagi dalam skema Hutan Desa 78.097,79 ha, Hutan Kemasyarakatan 51.220,01 ha, Hutan Tanaman Rakyat 5.669,54 ha, Hutan Adat 19.113 ha dan Kulin KK 6.844 ha. Dari 1,1 juta ha luas potensi PS di Riau, baru 13% atau seluas 160 ribu ha yang direalisasikan.

Salah satu penyebab rendahnya realisasi izin PS di Riau karena Syamsuar mengusulkan areal – areal potensi PS untuk masyarakat diusulkan menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui BUMD provinsi, bahkan Syamsuar sampai menemui Menteri Investasi untuk mengurus izin PBPH tersebut, ini sangat jauh berbeda dengan pernyataan Syamsuar di awal kepemimpinannya yang akan mendorong percepatan PS dalam program prioritas 100 hari.

### j. Konflik Sosial Masyarakat vs Perusahaan

Konflik antara korporasi hutan tanaman industry dan masyarakat kembali terjadi. PT Sumatera Riang Lestari (SRL) merampas lahan masyarakat secara sepihak. Mitra pemasok serat kayu ke

APRIL Grup yang terafiliasi dengan Royal Golden Eagle (RGE) milik taipan Sukanto Tanoto, itu menggusur kebun sawit milik petani dengan mengkavling lahan tersebut lewat pembuatan kanal.

Tak hanya itu, PT SRL menumbang dan mengubur pohon-pohon sawit milik masyarakat ke dalam tanah gambut. Masyarakat yang melihat tak mampu mencegah tiga alat berat yang dikawal sejumlah sekuriti untuk meratakan kebun sawit milik masyarakat.



Gambar I. Kebun sawit milik pak Gaol yang sudah diratakan oleh PT SRL dan ditanami akasia. Gambar diambil pada 12 November 2023 dengan kordinat N 0; 23; 59.2 E 102; 52; 19.5



Gambar II. Lahan milik pak Gaol yang sudah di staking PT SRL ditanami akasia dan sawit. Gambar diambil pada 12 November 2023 dengan kordinat N 0; 23; 59.1 E 102; 52; 18

### III. Visi Misi Capres Menjawab Persoalan Ekologis di Riau?

Masing-masing kandidat calon presiden dan wakil presiden merangkung gagasan-gagasan mereka untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan dalam dokumen visi – misi mereka.

Berbagai ide-ide dengan fokus sektor krusial di Indonesia didedah dan dirancang Solusi untuk menyelesaikan persoalannya. Tak main – main, tiap kandidat merancang ada 8 misi yang hendak mereka realisasikan untuk membawa Indonesia lebih maju kala mereka menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Setiap kandidat pun memiliki perhatian terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam visi misi Anies – Muhaimin, isu ekologis menjadi bagian dari Misi Ketiga yang mereka usung: *Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.*

Sedangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo dan Gibran menjadikan isu lingkungan bagian dari Misi Kedua yaitu: *Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.*

Pasangan Ganjar dan Mahfud meletakkan isu lingkungan sebagai bagian dari Misi Keenam yaitu: *Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi biru dan hijau.*

Masing-masing misi ini pun dijabarkan lagi oleh tiap kandidat ke dalam rencana program yang akan dilakukan untuk merealisasikan misi-misi ini. Menjadi hal yang menarik bagaimana seluruh kandidat menjadikan isu ekologis sebagai misi besar yang hendak mereka kerjakan dalam 5 tahun kepemimpinannya. Namun, ada pertanyaan besar yang perlu dijawab.

***Bisakah dan beranikah para kandidat capres dan cawapres menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah mengakar di Indonesia?***

Sebagai contoh kasus, pada bagian II catatan ini, Jikalahari telah memaparkan berbagai persoalan lingkungan yang bermuara dari monopoli korporasi dan praktik - praktik illegal yang dilakukan industri besar tersebut, tak hanya kepada lingkungan, bahkan kepada masyarakat di sekitarnya. Cakar-cakar para korporasi ini bahkan sudah menancap sangat dalam, bahkan tidak menutup kemungkinan ikut bergerilya dalam mendanai kampanye-kampanye dari masing-masing kandidat capres – cawapres.

Dalam laporan *Tempo*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berhasil melacak ratusan transaksi mencurigakan di lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai yang nilainya triliunan rupiah. Dari pelacakan tersebut, ditemukan adanya aliran dana kampanye yang diduga bersumber dari tambang illegal dan sumber kegiatan illegal lainnya<sup>6</sup>.

Ini menunjukkan, realisasi komitmen terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan saja sudah berada di ujung tanduk. Sebab, para kandidat sudah menerima dana kampanye dari perusahaan yang merusak lingkungan. Tidak menutup kemungkinan, ada janji-janji politik yang perlu direalisasikan pasca kandidat terpilih menang dan telah menerima dana politik dari Perusahaan tersebut.

***Sekali lagi, pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kandidat, apakah mereka berani melawan para perusak lingkungan tersebut dan berani tidak terikat janji – janji politik pasca mereka terpilih? Serta bisakah mereka merealisasikan rencana – rencana kerja yang mereka canangkan dalam dokumen visi – misi secara realistis?***

Mari kita dedah visi – misi dari tiap calon terkait komitmen mereka terhadap ruang ekologis.

**A. Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar**

Anies Rasyid Baswedan menjadi calon Presiden Indonesia pasca menyelesaikan masa abadinya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 – 2022 silam. Pria kelahiran Kuningan, 7 Mei 1969 ini memiliki latar belakang dari keluarga pendidik. Kedua orang tuanya merupakan dosen di salah satu universitas di Yogyakarta.

<sup>6</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1811644/kata-jokowi-soal-uang-haram-untuk-kampanye-yang-ditemukan-ppatk>

Begitu pula dengan Anies, pasca menyelesaikan gelar sarjana ekonominya di Universitas Gajah Mada (UGM), melanjutkan studi S2 di *University of Maryland* jurusan International Security dan Economic Policy serta memperoleh gelar PhD di *Northern Illinois University* jurusan ilmu politik, ia kembali ke Indonesia dan menjadi Rektor di Universitas Paramadina. Ia juga menggagas Gerakan Indonesia Mengajar, mengajak dan memberdayakan generasi muda yang direkrut, dilatih dan dikirim untuk mengabdikan di masyarakat sebagai guru di pelosok Indonesia selama satu tahun.

Jelang pemilu 2014, Anies mulai terjun ke dunia politik menjadi juru bicara kampanye Jokowi – Jusuf Kalla. Terpilih sebagai Presiden, Jokowi menunjuk Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun direshuffle pada 2016. Karir politiknya terus berlanjut dan maju dalam pemilihan Gubernur DKI diusung Partai Gerindra, PKS dan Demokrat.

Selesai sebagai Gubernur DKI, ia kembali maju dalam kontestasi politik sebagai Calon Presiden Indonesia non partai berpasangan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pria kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini juga menjabat sebagai Wakil ketua DPR RI periode 2019 – 2024.

Cak Imin merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang telah menyelesaikan Pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, dilanjutkan S2 di Magister Ekonomi Universitas Indonesia serta memperoleh Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dari Universitas Airlangga.

Ia memulai karir politiknya sebagai aktivis Gerakan reformasi 98 dan diangkat sebagai Wakil ketua DPR RI periode 1999 – 2004. Hingga hari ini, ia merupakan anggota DPR RI selama 4 periode dan pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden pada 2009.

Kedua pasangan ini—kandidat dengan nomor urut 1 pada pilpres 2024—kerap disingkat dengan AMIN. Diusung oleh Koalisi partai antara lain PKB, Partai Nasdem, PKS dan Partai UMMAT, mereka memiliki 167 dari 575 jumlah kursi anggota DPR periode 2019 – 2024.

Mengusung visi *Indonesia Adil Makmur untuk Semua*, AMIN mengusung perubahan bagi Indonesia sebagai gagasan untuk mewujudkan Impian rakyat Indonesia sesuai visi yang mereka usung. Untuk melakukan perubahan itu, mereka menyusun misi yang diberi nama 8 Jalan Perubahan yang dinilai sebagai langkah konkrit mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik.

Dalam dokumen visi – misinya, disebutkan Indonesia perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. *Kita harus pastikan lingkungan hidup yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang lebih baik daripada kondisi yang kita terima dari para pendahulu.*

Untuk melaksanakan visi-misinya, AMIN akan melakukan Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup dengan cara: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis, termasuk keadilan antar generasi; Melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya; dan Memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan mengedepankan aspek tanggung jawab pemulihan melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas aparat penegakan hukum.

Lalu pada bagian Adaptasi dan Mitigasi Dampak Krisis Iklim, AMIN akan memprioritaskan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan komitmen Indonesia dalam ikut mengerem laju pemanasan global; Menekan laju kerusakan hutan, konservasi *intake forest*, dan reforestasi/rehabilitasi untuk memaksimalkan peran hutan sebagai *carbon sink* dan Mengoptimalkan restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran, memperlambat perubahan iklim dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi rakyat;

Dalam acara Mata Najwa *on stage* Yogyakarta yang digelar pada 21 September 2023 di UGM<sup>7</sup>, Anies juga menyampaikan gagasannya selaku calon presiden pada isu krisis iklim. Menurutnya *Penentuan program sebagai program strategis atau tidak, harus ada di tangan teknokrasi, bukan di tangan dunia usaha. Kalau itu dibalik, proposalnya dari dunia usaha, pemerintah hanya memberikan stempel, maka akan muncul banyak sekali masalah.* Ini sejalan dengan penjelasan yang dimuat dalam dokumen visi – misi halaman 10 yang menjelaskan *Pembangunan tanpa visi ekologis menyulut krisis biodiversity yang merupakan aset berharga kita.*

Rencana – rencana AMIN dalam isu ekologis termasuk visioner dibandingkan kandidat lainnya. Rencana yang dibangun rinci dan melanjutkan apa yang telah termaktub dalam kebijakan-kebijakan LHK yang ada saat ini. Terlepas apakah ini karena adanya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang merupakan kader Nasdem serta para pakar yang menyusun muatan dari rencana kerja untuk isu ekologis, hal ini patut diacungi jempol.

Namun perlu dicatat, AMIN maju sebagai bagian dari Koalisi 4 partai yang tercatat memiliki rekam jejak berkaitan dengan isu lingkungan. Segala kebijakan yang diambil, tak bisa dinafikan akan berkaitan dengan suara-suara dari partai pendukung.

Untuk rekam jejak pribadi baik dari Anies maupun Muhaimin, belum ditemukan komitmen atau aksi konkrit dari keduanya berkaitan dengan isu lingkungan semasa mereka memegang jabatan publik strategis.

Bijak Memilih merangkum rekam jejak dari masing-masing partai pendukung AMIN terkait isu ekologis dan korupsi (kaitan dengan RUU KPK untuk isu korupsi berkaitan dengan isu ekologis) sebagai berikut<sup>8</sup>:

**Tabel 7. Rekapitulasi isu atau kasus yang melibatkan partai pendukung AMIN**

Isu / Kasus	PKB	Nasdem	PKS	UMMAT
Kursi di DPR Saat ini	58	59	50	0
Pengesahan UU IKN <sup>9</sup>	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	-
Pengesahan UU Cipta Kerja <sup>10</sup>	Setuju	Setuju	Tidak Setuju	-
Pembahasan RUU EB-ET <sup>11</sup>	Setuju	Setuju	Setuju	-

<sup>7</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=kiaKPHMABuc&ab\\_channel=NajwaShihab](https://www.youtube.com/watch?v=kiaKPHMABuc&ab_channel=NajwaShihab) menit [1:13:46-1:16:13]

<sup>8</sup> <https://www.bijakmemilih.id/partai>

<sup>9</sup> Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk ibu kota baru (IKN). Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap kontroversial karena berbagai alasan, seperti dugaan dalam memprioritaskan investasi asing di atas perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

<sup>10</sup> Undang-undang yang dituduh mengurangi hak-hak pekerja dan lingkungan, demi perusahaan dan investasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini tidak konstitusional karena disahkan tanpa partisipasi publik yang cukup.

<sup>11</sup> RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Namun, ini dianggap kontroversial karena mengkategorikan produk turunan batu bara sebagai energi 'baru'.

Pembahasan RKUHP <sup>12</sup>	Setuju	Setuju	Setuju dengan Catatan	-
Pembahasan RUU KPK <sup>13</sup>	Setuju	Setuju	Setuju dengan Catatan	-
Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK <sup>14</sup>	Setuju	Setuju	Setuju	-
Revisi UU ITE <sup>15</sup>	Setuju	Setuju	-	-
Kenaikan Harga BBM Subsidi <sup>16</sup>	Setuju dengan Catatan	Setuju	Tidak Setuju	-
Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat <sup>17</sup>	Setuju	Setuju	-	-
Anggota Partai Terlibat Kasus Suap & Gratifikasi	18 kasus	18 kasus	17 Kasus	-
Total Suap & Gratifikasi	35,8 miliar	224 miliar	97 miliar	-
Kasus Korupsi Merugikan Keuangan Negara	-	3 kasus	1 kasus	-
Total Kerugian Negara	-	8,07 triliun	2,8 miliar	-

Selain rekam jejak dari masing – masing partai pendukung AMIN, Bijak Memilih juga memetakan afiliasi politik dan tim pemenangan dari AMIN. Hal ini dilakukan untuk melihat siapa saja orang-orang berpengaruh yang memiliki campur tangan dalam memenangkan AMIN sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden Indonesia<sup>18</sup>.

Sebagai partai pendukung, nama Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem serta Ahmad Syaikh, Ketua Umum PKS berada di barisan pendukung utama menyusul Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan. Al Muzzammil Yusuf, Mantan Ketua Umum PKS juga ditunjuk sebagai Co-Kapten tim pemenangan pasangan ini.

Di belakangnya, terpantau ada 3 nama pengusaha yaitu Thomas Trikasih Lembong yang merupakan Mantan Direktur Utama PT Pindad dan Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia. Kini ia CEO dan Managing Partner di Quvat Management, perusahaan dana ekuitas serta pernah menjadi Presiden Komisaris di PT Graha Layar Prima/ Blitz Megaplex. Sedangkan Leontinus Alpha Edison, co-founder PT Tokopedia sekaligus Presiden Komisaris Perusahaan IT Dekara. Terakhir Gede Widiade, pengusaha asal Bali, mantan Direktur Utama Persija dan kini malang melintang di kepemimpinan klub sepak bola Indonesia.

Dari barisan Militer/ Polri, Marsekal (Purn) M Syaugi Alaydrus, Mantan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditunjuk sebagai Kapten tim pemenangan AMIN.

<sup>12</sup> Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memicu protes massal pada tahun 2019 karena dinilai berpotensi menghambat kebebasan berpendapat, melanggar hak privasi, dan mengurangi hukuman bagi koruptor, antara lain. Revisi ini disahkan pada Desember 2022.

<sup>13</sup> Revisi yang dituduh melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membatasi independensi penyelidik dan proses penyelidikan. Meskipun mendapat protes massal, revisi ini disahkan pada tahun 2019.

<sup>14</sup> Firli Bahuri dipilih sebagai Ketua KPK oleh Komisi III DPR di tahun 2019. Firli telah beberapa kali terbukti melanggar kode etik dan memiliki catatan kerja yang kurang baik. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

<sup>15</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang kontroversial yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi mereka yang mengkritik pihak yang berkuasa karena pasal-pasal yang 'karet'. Saat ini, terdapat draf revisi yang sedang dibahas

<sup>16</sup> Pada September 2022, pemerintah mengalihkan sebagian dana dari subsidi BBM ke program bantuan sosial, yang menyebabkan kenaikan harga BBM yang disubsidi.

<sup>17</sup> Sebuah rancangan undang-undang mengenai hak tanah, ekonomi, dan sosial masyarakat adat. Konflik kepentingan antara investor dan masyarakat adat tengah menghambat pengesahan RUU ini.

<sup>18</sup> <https://www.bijakmemilih.id/profil-pasangan/anies-cakimin#s3-afiliasi>

Tim pemenang AMIN dibandingkan dengan 2 kandidat lainnya adalah tim yang kaya dengan berbagai latar belakang dan minim anggotanya yang berlatar belakang pengusaha. Hal ini patut menjadi nilai plus dimana akan meminimalisir intervensi mengakomodir suara-suara ‘kepentingan swasta dan pengusaha’ saat mengambil kebijakan terkait dengan sektor lingkungan. Tak hanya itu, dana kampanye AMIN tidak ditemukan ada yang berasal dari sektor swasta ataupun pengusaha.

Beralih pada gagasan – gagasan AMIN terkait isu ekologis dalam visi – misinya, Jikalahari mengaitkan penjabaran dari visi – misi AMIN dengan kondisi real di lapangan, khususnya Riau.

### 1. **Komitmen Pemberantasan Korupsi**

Maraknya kasus lingkungan di Riau—apalagi berkaitan dengan kehutanan—bermula dari kasus korupsi perizinan kehutanan yang melibatkan Gubernur Riau, 2 bupati (Siak dan Pelalawan) serta 4 Kepala Dinas Kehutanan Riau. Hingga saat ini para pelaku yang merupakan pejabat publik sudah diproses secara hukum dan menjalani masa hukumannya.

Namun, korporasi sebagai pelaku yang terlibat memberi suap dan menikmati hasil dari perizinan yang mereka peroleh dengan cara kotor masih belum ditindak sama sekali. Sudah 15 tahun berlalu sejak 2008, korporasi masih belum tersentuh dan tak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dalam putusan terdakwa Rusli Zainal dan Azmun Jaafar jelas majelis hakim yang memutuskan perkara menyebutkan para korporasi harus ditindak.

Terkait kasus ini, sejalan dengan misi yang ingin dikerjakan AMIN dalam penguatan tata kelola lingkungan hidup dimana AMIN ingin memperkuat penegakan hukum terutama berkaitan dengan LHK dan SDA.

Dalam debat putaran pertama capres, Anies yang ditanya oleh panelis terkait apa saja terobosan yang akan dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus dapat menyelamatkan aset negara memberikan jawaban bahwa akan mendorong RUU perampasan aset, hukuman bagi koruptor berupa pemiskinan serta mendorong Revisi UU KPK agar KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Selain itu Anies juga menyampaikan akan memberikan reward kepada yang melakukan pelaporan dan penyelidikan, maka gerakan anti korupsi akan melibatkan seluruh masyarakat serta standar etika yang tinggi untuk pimpinan KPK.

Narasi ini sepertinya akan menghadapi tantangan sebab partai pendukung AMIN—Nasdem, PKB dan PKS—justru adalah pihak-pihak yang setuju mendorong revisi UU KPK pada 2019 silam. Walaupun PKS menyatakan setuju dengan catatan, catatan tersebut bukanlah sesuatu yang krusial. Sehingga pada akhirnya pelemahan KPK memasuki jalur tol pasca revisi disahkan.

Terlebih lagi, jika AMIN hendak melakukan penegakan hukum yang berintegritas untuk para pelaku koruptif, mereka harus mengambil langkah berani. Sebab melihat rekam jejak partai pendukung, rata-rata tiap partai pendukung AMIN terlibat lebih dari 15 kasus korupsi dan banyak menimbulkan kerugian terhadap negara.

Benarkah AMIN berani mendorong RUU perampasan aset, memiskinkan koruptor serta mengembalikan KPK menjadi Lembaga anti rasuah yang kuat?

## 2. Karhutla

Merujuk pada langkah AMIN dalam adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, dijelaskan langkah menekan laju kerusakan hutan, reforestasi dan rehabilitasi serta optimalisasi restorasi gambut untuk mencegah karhutla adalah salah satu langkah yang akan mereka jalani.

Menilik bagaimana karhutla besar terjadi pada 2015 dan 2019 serta terbaru pada tahun 2023 ini, tentunya ini akan menjadi kerja yang sangat diprioritaskan oleh AMIN kelak. Upaya untuk merestorasi gambut untuk mencegah karhutla sudah digalakkan dari 2016 sejak Badan Restorasi Gambut pertama kali dibentuk, namun hingga kini realisasi restorasi masih juga belum mencapai targetnya. Sebab, areal terbakar banyak berada di konsesi Perusahaan baik pulp dan kertas ataupun sawit.

Begitu pula upaya untuk mencegah laju kerusakan hutan (deforestasi), walaupun laju deforestasi beberapa tahun ini tidak terlalu drastis—sebab hutan alam yang tersisa sudah tak banyak lagi—tetap saja ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan. Sebab penebangan hutan alam tersisa ini banyak terjadi dalam areal izin Perusahaan.

Ditambah atas pengesahan UU Cipta Kerja—didukung oleh 2 partai pendukung AMIN Nasdem dan PKB—Perusahaan pulp dan kertas memiliki waktu lebih lama untuk mengelola areal hutan Indonesia hingga 180 tahun. Benarkah AMIN dapat mengatasi persoalan ini dengan baik?

## 3. Konflik Sosial dan Perampasan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Tanah

Dalam misinya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan melibatkan Masyarakat terutama masyarakat adat, kelompok rentan dan perempuan serta mendorong prinsip keadilan sosial dan ekologis, hal ini menjadi tantangan besar bagi AMIN. Tercatat berbagai konflik sosial terjadi antara Masyarakat dan Perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Dari hasil penelitian Prof Afrizal, Guru Besar Sosiologi Universitas Andalas menemukan setidaknya ada 150 kasus yang mereka temukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Riau dan Sumatera Barat terkait konflik Masyarakat dengan Perusahaan sawit yang ada di daerah tersebut<sup>19</sup>. Hal ini disebabkan ketimpangan akses yang dimiliki Masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah hutan adat yang mereka miliki secara turun temurun. Berbeda dengan korporasi yang dapat memperoleh perizinan dan akses informasi yang tak terbatas.

Prof Ward Berenschot, peneliti senior KITLV Leiden University menjelaskan bahwa tidak diakuiinya hutan tanah adat Masyarakat, penyelesaian yang didorong pemerintah berupa kompensasi bukannya jalan untuk memperoleh hak tanah mereka secara legal serta mekanisme resolusi konflik yang tidak efektif menyebabkan konflik ini tak pernah tampak titik terang penyelesaiannya.

<sup>19</sup> <https://fisipol.uqm.ac.id/kehampaan-hak-masyarakat-dalam-konflik-korporasi-lahan-sawit-ungkap-99-kasus-pengambilan-lahan-tanpa-izin/>

Untuk menyelesaikan persoalan ini AMIN harus benar – benar progresif, mengingat dua partai pendukungnya PKB dan Nasdem menyetujui pembahasan RUU Masyarakat hukum adat, harusnya hal ini dapat segera digesa. Ditambah lagi AMIN tidak memiliki barisan pengusaha ekstraktif berhubungan dengan SDA dalam tim pemenangnya, tentunya hal ini dapat menjadi salah satu pekerjaan yang dapat diselesaikan AMIN.

#### 4. Energi Terbarukan

AMIN dalam misinya memanfaatkan energi baru terbarukan menggesa agar peran EBT dapat menjadi maksimal sehingga Indonesia dapat melepaskan diri dari ketergantungan impor energi dengan memanfaatkan panas bumi, tenaga air, energi laut, tenaga surya dan biomass.

Secara garis besar hal ini mengedepankan inovasi dan membawa angin segar. Namun AMIN harus lebih teliti dan jangan sampai salah kaprah. Sebab berdasarkan RUU EB-ET—RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan—hal yang paling dianggap kontroversial adalah dalam RUU ini produk turunan batu bara dikategorikan sebagai energi 'baru'. Belum lagi adanya indikasi sumber energi biomass berasal dari HTI hanya dijadikan greenwashing untuk menggundulkan hutan Indonesia. RUU ini didukung oleh ketiga partai pendukung AMIN.

#### 5. Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau menjadi salah satu misi AMIN terutama kaitan untuk menyukseskan Net Zero Emission. Dorongan untuk mendorong Pembangunan berkelanjutan, integrasi indeks ekonomi hijau dalam persyaratan perizinan yang akan dijadikan basis evaluasi risiko sektor keuangan serta pembiayaan disektor hijau menjadi hal yang diutamakan AMIN dalam rencana kerjanya. Hal ini merupakan hal yang menarik dan menjadi peluang yang baik dalam mendorong perbaikan ekonomi yang sejalan dengan perlindungan lingkungan.

Namun AMIN harus benar-benar memastikan bahwa persyaratan perizinan berbasis lingkungan dan dijadikan basis evaluasi risiko sektor keuangan dapat dijalankan dengan baik. Mengingat bagaimana saat ini, terutama industri pulp dan kertas serta sawit sangat banyak mendapatkan pendanaan dari sektor keuangan namun masih rendah menerapkan penilaian lingkungan sebagai basis evaluasi risiko.

Dari *Forest and Finance*, ditemukan total pendanaan yang diterima 9 grup besar sektor pulp dan kertas selama 12 tahun mencapai USD 34,9 miliar atau setara dengan Rp 544 triliun (1 USD=Rp 15.000). Pendanaan yang diterima ini berupa investasi (*share holdings dan share issuance*) dan pinjaman (*revolving credit facility, corporate loan, bond issuance dan bond holding*) yang diberikan PUSK kepada perusahaan.

Untuk sektor perkebunan kelapa sawit, data dari *Forest and Finance*, terdapat 66 grup besar yang beraktifitas di Indonesia. Total pendanaan yang diterima oleh grup sektor sawit ini mencapai USD 65 miliar atau setara dengan Rp 976,2 miliar.

Jumlah pendanaan yang diterima sangat besar dan dominan berasal dari sektor keuangan lokal (Indonesia) yang dinilai masih abai terhadap evaluasi risiko yang memperhatikan Pembangunan berkelanjutan. Seperti pada penjelasan sebelumnya di

bagian II, sektor keuangan hanya memberikan penilaian berdasarkan dokumen di atas kertas tanpa melihat realisasi di lapangan bagaimana perlindungan terhadap Masyarakat, keadilan sosial serta pengrusakan lingkungan membayangi aktifitas dari korporasi yang menjalankan usahanya dan abai terhadap perlindungan lingkungan.

AMIN yang di belakangnya minim pengusaha industri ekstraktif harusnya dapat mendorong ini menjadi misi yang patut dikedepankan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang baik dan sejalan dengan perlindungan lingkungan sehingga dapat tercapai Pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

#### **6. Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati**

Hutan dan keanekaragaman hayati menjadi fokus misi lainnya dari AMIN. Mendorong penguatan perbaikan tata kelola kehutanan dan mempercepat pengelolaan hutan oleh Masyarakat, memulihkan ekosistem yang terdegradasi, upaya restorasi Kawasan lindung serta perlindungan terhadap satwa dan flora yang terancam punah adalah beberapa di antara poin yang ingin dikerjakan AMIN.

Percepatan pengelolaan hutan oleh Masyarakat telah diakomodir melalui regulasi perhutanan sosial saat ini. Sayangnya, realisasi yang masih jauh dari target membuat pengelolaan oleh Masyarakat ini masih memerlukan proses yang panjang. Keterbatasan akses dan masih dominannya Kawasan yang hendak dikelola Masyarakat berada di dekat ataupun dalam konsesi korporasi membuat proses pengajuan izin pengelolaan ini berlarut-larut.

Langkah progresif yang dapat dilakukan oleh AMIN adalah mengevaluasi perizinan dari perusahaan yang ada, dan jika dinilai mereka tidak mampu mengelola lahan ini, akan lebih baik, izinnya dikurangi dan areal yang dibebaskan tersebut diberikan izin pengelolaannya kepada Masyarakat.

Pertanyaannya, beranikan AMIN mengambil langkah ini?

Karena tidak banyak izin perusahaan yang berani dicabut oleh pemerintah sejak tahun 90an, kecuali pada awal 2022 silam dimana Presiden Jokowi mencabut dan mengevaluasi 2.078 perizinan tambang, 192 izin sektor kehutanan dan mencabut HGU 34 ribu ha Perkebunan sawit yang ditelantarkan.

Jika benar AMIN berani mengambil Tindakan ini, tentunya akan membuka pintu untuk Masyarakat memiliki peluang mengelola hutan dengan Lestari untuk meningkatkan perekonomian mereka serta menjadi jalan untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Karena Masyarakat tidak akan menanam tanaman monokultur seperti industri kayu dan sawit. Karena itu, hutan sebagai rumah bagi flora dan fauna yang dilindungi akan terus terjaga kelestariannya.

Jikalahari menilai, AMIN masih belum berani dengan tegas menyatakan ‘perang’ terhadap korporasi yang nyata merupakan sumber dari segala persoalan LHK yang terjadi. Dalam visi misinya, AMIN memang mendorong adanya penegakan hukum dan perbaikan tata kelola lingkungan hidup. Namun, ia tidak berani dengan tegas menyatakan akan mencabut ataupun mereview perizinan korporasi yang nyata telah melakukan pengrusakan ataupun kejahatan lingkungan.

AMIN juga tidak berani dengan tegas menyuarakan untuk memberikan ruang Kelola kepada masyarakat, terutama masyarakat adat. Dalam visi misinya AMIN hanya secara normatif mendorong keadilan ruang kelola dan melibatkan masyarakat. AMIN juga tidak berani dengan tegas menyatakan demi penegakan hukum yang berkeadilan maka penegak hukum harus 'jarak' dengan pihak korporasi terutama yang terlibat dalam kejahatan LHK.

Untuk itu, Jikalahari menilai AMIN belum progresif dalam visi misinya untuk menyatakan perang dengan perusak lingkungan dan pada akhirnya tidak akan menyelesaikan akar masalah lingkungan yang ada di Indonesia, khususnya Riau.

## B. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka

Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan kandidat dengan nomor urut 2 pada pilpres 2024 yang diusung oleh 9 partai koalisi yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora Indonesia, Partai Garda Republik Indonesia, PSI dan Partai Prima. Koalisi ini memiliki 265 kursi atau 46% dari 575 kursi anggota DPR RI periode 2019 – 2024.

Prabowo dan Gibran mengusung visi *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*. Visi ini akan dijalankan dengan 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat.

Prabowo dan Gibran menjadikan isu lingkungan bagian dari Misi Kedua yaitu: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Dalam dokumen visi – misi pasangan capres dan cawapres Prabowo Gibran, pelestarian lingkungan hidup akan menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman dan percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target *Net Zero emisi Gas Rumah Kaca (GRK)*.

Dalam Ekonomi Hijau, Prabowo dan Gibran akan berkomitmen untuk menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.

Lalu, memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi. Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Prabowo dan Gibran juga berkomitmen untuk mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, baik itu perorangan maupun korporasi menjadi fokus utama yang akan dilakukan oleh Prabowo dan Gibran dalam ekonomi hijau. Namun sejauh mana implementasi ini akan dijalankan jika nanti Prabowo dan Gibran terpilih sebagai presiden dan wakil presiden karena ada banyak pengusaha di balik pendukungnya seperti Rosan Perkasa Roeslani, Mantan Ketua Kadin 2010 -2015 dan juga pendiri PT Palapa Nusantara Berdikari. Selain itu juga terdapat nama-nama pengusaha seperti Abu Rizal Bakri, Hasyim Djojo Hadikusumo, Putri Khuswisnu Wardani, Mahel Algadri, Theo Shambuaga, Erwin Aksa, dan Pandu Sjahrir.

Bijak Memilih merangkum rekam jejak dari masing-masing partai pendukung Prabowo-Gibran terkait isu ekologis dan korupsi (kaitan dengan RUU KPK untuk isu korupsi berkaitan dengan isu ekologis) sebagai berikut<sup>20</sup>:

**Tabel 8. Rekapitulasi isu atau kasus yang melibatkan partai pendukung Prabowo dan Gibran**

Isu / Kasus	PAN	Golkar	Gerindra	Demokrat
Kursi di DPR Saat ini	44	85	78	54
Pengesahan UU IKN	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Pengesahan UU Cipta Kerja	Setuju	Setuju	Setuju	Tidak Setuju
Pembahasan RUU EB-ET	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Pembahasan RKUHP	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Pembahasan RUU KPK	Setuju	Setuju	Setuju dengan Catatan	Setuju dengan Catatan
Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
Revisi UU ITE	Setuju	Setuju	-	Setuju
Kenaikan Harga BBM Subsidi	Setuju dengan Catatan	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju
Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Setuju
Anggota Partai Terlibat Kasus Suap & Gratifikasi	28 kasus	64 kasus	23 Kasus	48
Total Suap & Gratifikasi	195 miliar	280 miliar	62,3 miliar	119 Milliar
Kasus Korupsi Merugikan Keuangan Negara	1	9 kasus	-	9 kasus
Total Kerugian Negara	2,18 Miliar	3,27 triliun	-	1,12 Triliun

Beralih pada gagasan – gagasan Prabowo dan Gibran terkait isu ekologis dalam visi – misinya, Jikalahari mengaitkan penjabaran dari visi – misi Prabowo dan Gibran dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya Riau.

<sup>20</sup> <https://www.bijakmemilih.id/partai>

## 1. Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di Riau. Catatan Jikalahari pelaku utamanya adalah korporasi dengan modus untuk membuka lahan baru maupun mengganti lahan yang tidak produktif.

Pada 2023, karhutla kembali terjadi di Riau. Polusi asap akibat karhutla menyebabkan kualitas udara di Pekanbaru berada di level Tidak Sehat, berdasarkan data Satgas Karhutla Provinsi Riau hingga Desember 2023, luas karhutla di Riau mencapai 6.990 hektar. Polusi asap ini mengakibatkan 31 ribu orang terpapar infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Temuan Jikalahari, salah satu penyumbang polusi asap adalah korporasi PT Arara Abadi yang terbakar pada Oktober 2023, namun hingga saat ini belum ada penyelidikan dari kepolisian maupun Gakkum KLHK. Selain PT Arara Abadi, Grup APRIL dengan anak usahanya PT RAPP juga selalu lolos dalam penegakan hukum terkait karhutla. Pada 2019 PT RAPP bersama PT Arara Abadi sudah disegel oleh Gakkum KLHK namun tak kunjung jadi tersangka.

Dalam visi-misinya, Prabowo dan Gibran akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan, lalu apakah Prabowo dan Gibran berani mengimplementasikannya? Karena Prabowo juga tercatat memiliki beberapa perusahaan pulp dan kertas serta Perkebunan sawit seperti PT Kertas Nusantara, PT Kiani Hutani Lestari, PT Tusam Hutani Lestari, PT Tanjung Redeb Hutani, dan PT Belantara Pusaka.<sup>21</sup>

## 2. Komitmen Pemberantasan Korupsi

Prabowo dan Gibran menempatkan komitmen pemberantasan korupsi pada misi ke 7 yaitu *memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi*. Untuk mencapai misi ini, Prabowo dan Gibran menyusun 17 program prioritas, pencegahan dan pemberantasan korupsi masuk pada point ke 4.

Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara. Pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian negara.

Narasi pemberantasan korupsi Prabowo dan Gibran belum menyinggung korporasi – korporasi yang terlibat korupsi. Misal di Riau, ada 20 korporasi korupsi kehutanan yang sudah 15 tahun belum dihukum bahkan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Padahal 20 korporasi ini disebutkan dalam proses persidangan Azmun Jaafar, Arwin AS (Siak), tiga kepala dinas kehutanan, serta Rusli Zainal. Atas korupsi yang dilakukan para terpidana menerbitkan IUPHHK-HT serta mengesahkan RKT di atas hutan alam telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan kedua puluh korporasi tersebut sebesar Rp 1,3 triliun.

<sup>21</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231213121259-128-496880/disentil-anies-saat-debat-capres-apa-saja-bisnis-prabowo>

Prabowo dan Gibran akan menghadapi tantangan sebab partai pendukung seperti Golkar, PAN, Gerindra dan Demokrat merupakan pihak-pihak yang setuju mendorong revisi UU KPK pada 2019 silam. Walaupun fraksi Demokrat dan Gerindra memberikan catatan terkait pemilihan dewan pengawas KPK oleh pemerintah atau presiden namun mereka tetap menyetujui revisi UU KPK tersebut.

Terlebih lagi, jika Prabowo-Gibran hendak melakukan penegakan hukum terhadap koruptor dengan menghilangkan keuntungan pada pelaku. Sebab melihat rekam jejak partai pendukung yang berada di DPR RI maupun Menteri periode 2014 – 2024 banyak terlibat korupsi dan banyak menimbulkan kerugian terhadap negara mencapai 7,226 triliun.

Benarkah Prabowo-Gibran berani memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya? Sedangkan 4 partai besar pendukungnya banyak terlibat kasus korupsi.

### 3. *Perlindungan Keanekaragaman Hayati*

Riau merupakan salah satu provinsi yang masih memiliki satwa langka yang dilindungi seperti Harimau Sumatera dan Gajah. Kehadiran korporasi HTI dan sawit akibatnya konflik satwa dan manusia karena wilayah jelajah harimau dan gajah semakin sempit.

Catatan Jikalahari, sejak 2018 khusus di Lansekap Kerumutan sudah 7 orang meninggal, 4 orang di antaranya di konsesi APP Grup, yaitu Tugiat di konsesi PT Satria Perkasa Agung, Darmawan di konsesi PT Bhara Induk pada 2019, MS berusia 12 tahun di konsesi PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa dan Wahyu Kurniadi di konsesi PT Riau Indo Agropalma.

Selain konflik harimau dan manusia, temuan gajah mati juga kerap terjadi di Riau. Yang terbaru pada November 2023, seekor anak gajah mati terjatuh di Pelalawan, lalu pada Juli 2023 seekor gajah juga mati di racun di Pelalawan. Sebelumnya pada 2016, seekor gajah betina umur 25 tahun mati dalam kubangan air di Distrik II Duri, lalu pada November 2019, seekor gajah jantan umur 40 tahun mati dengan kepala terpisah dari badannya di konsesi PT Arara Abadi Distrik II Duri.

Dalam visi-misinya, Prabowo dan Gibran akan melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa dan meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya.

Prabowo dan Gibran hanya bicara soal perlindungan satwa dengan penghentian perdagangan satwa liar dan upaya konservasi, namun tidak bicara soal konsesi HTI dan sawit yang merampas habitat Harimau Sumatera dan Gajah. Jika berbicara perlindungan ekosistem bagi satwa Langkah, mengevaluasi izin-izin konsesi HTI dan sawit adalah yang utama demi merealisasikan misi ini. Bisakah Prabowo dan Gibran melakukan hal tersebut?

### 4. *Konflik Sosial dan Perampasan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Tanah*

Di Riau, konflik lahan antara masyarakat dengan Perusahaan tak kunjung selesai seperti konflik PTPN V dengan Masyarakat Adat Pantai Raja, Konflik PT SRL dengan

Masyarakat Desa Mumpa dan Teluk Jirah dan Konflik PT NPM dengan Masyarakat Desa Pangkalan Gondai. Hal ini menunjukkan masyarakat kerap kehilangan hak Kelola atas hutan tanahnya karena monopoli korporasi baik HTI maupun sawit.

Pemerintah saat ini berupaya untuk memberikan ruang kelola skema perhutanan sosial untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun Jikalahari tidak menemukan Prabowo dan Gibran tertarik terhadap persoalan ini. Tidak ada narasi terkait penyelesaian konflik dalam visi-misi Prabowo dan Gibran.

Bisa jadi karena mereka didukung oleh 9 partai besar dan pengusaha-pengusaha dari perkebunan sawit, HTI dan tambang yang selalu berkonflik dengan masyarakat. Selain itu, dari *tracking* partai ditemukan Golkar menjadi salah satu partai yang menolak RUU Masyarakat Hukum Adat. Apakah karena ini Prabowo dan Gibran tidak memasukkan isu ini sebagai isu prioritas? Atau karena Prabowo dan Gibran lebih mementingkan pengusaha daripada masyarakat?

## 5. *Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat*

Percepatan pengelolaan hutan oleh masyarakat telah diakomodir melalui regulasi PS saat ini. Sayangnya, realisasi yang masih jauh dari target membuat pengelolaan oleh Masyarakat ini masih memerlukan proses yang panjang. Keterbatasan akses dan masih dominannya Kawasan yang hendak dikelola masyarakat berada di dekat ataupun dalam konsesi korporasi membuat proses pengajuan izin pengelolaan ini berlarut-larut.

Pemerintah Pusat menargetkan PS seluas 13.911.867 Hektar berdasarkan Peta Indikatif dan Areal PS revisi V melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020. Hingga 2023, berdasarkan data KLHK capaian Perhutanan Sosial se-Indonesia hingga Desember mencapai 6,4 juta hektar untuk 1,2 juta KK.

Salah satu program prioritas Prabowo dan Gibran adalah *Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan sektor pertanian, Perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan.*

Untuk mensejahterakan petani salah satu caranya dengan mengurangi lahan korporasi dan memberikannya kepada petani dengan skema perhutanan sosial dan relakah Prabowo menyerahkan konsesinya untuk dijadikan areal PS masyarakat.

Jika Prabowo dan Gibran berani mengambil tindakan tersebut, akan membuka pintu untuk masyarakat memiliki peluang mengelola hutan dengan lestari untuk meningkatkan pendapatannya.

## 6. *Energi Terbarukan*

Prabowo dan Gibran memasukkan komitmen terkait energi terbarukan berupa melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit. Mengembangkan *bioetanol* dari singkong dan tebu, sekaligus menuju kemandirian komoditas gula dan mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, dan panas bumi.

Terkait program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit tentunya berkaitan dengan produksi Perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luas lahan sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektar—3,3 juta hektar berada dalam kawasan hutan tanpa izin—51 persen dikelola grup usaha besar baik nasional maupun asing, 7 persen dikelola oleh BUMN dan sekitar 40 persen milik petani. Dari sisi produksi, petani sawit menyumbang sekurangnya 33 persen dari jumlah total mencapai 48 juta ton, atau sekitar 14 juta ton.

Komitmen Prabowo dan Gibran melanjutkan biodiesel dan bio-avtur bentuk akal-akalan untuk bisa menampung CPO yang bercampur dengan TBS yang berasal dari kawasan hutan, jikalau CPO tersebut mendapat penolakan dari pasar internasional sehingga diolah sendiri menjadi biodiesel atau bio-avtur. Seharusnya Prabowo dan Gibran fokus menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan baru bicara hilirisasi sawit.

Selain itu, program biodiesel dan bio-avtur hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha sawit. Berdasarkan data Badan Pengelola dana Kelapa Sawit (BPDPKS), hingga Juni 2023 telah menggelontorkan insentif program biodiesel B35 sebesar Rp 4,04 triliun. Insentif biodiesel merupakan insentif yang diberikan kepada badan usaha bahan bakar nabati pemasok biodiesel untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Sepanjang 2019 -2021, BPDPKS mengucurkan dana sebesar Rp 68 triliun yang diterima oleh; Wimar menerima Rp 22,56 triliun, Musim Mas sebesar Rp 11,34 triliun, Royal Golden Eagle sebesar Rp 6,41 triliun, Sinar Mas sebesar 5,53 triliun, Permata Hijau sebesar Rp 5,52 triliun, Darmex Agro sebesar Rp 5,4 triliun, Louis Dreyfus sebesar 2,9 triliun, Sungai Budi sebesar Rp 2,56 triliun, Best Industry sebesar Rp 2 triliun dan First Resources sebesar Rp 1,9 triliun.

Kebijakan ini jelas menguntungkan pengusaha-pengusaha yang menjadi penyebab deforestasi, konflik, karhutla dan persoalan lingkungan lainnya di Riau.

## 7. Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan salah satu program prioritas Prabowo dan Gibran yaitu, Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission. Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi dan Melanjutkan program mempersiapkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.

Komitmen Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global tercermin dalam partisipasinya pada Perjanjian Paris yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam dokumen FOLU Net Sink 2030, NDC Indonesia menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional. Terdapat 5 sektor dalam NDC yang berperan dalam penurunan emisi GRK, yaitu energi, limbah, industrial processes and production use (IPPU), pertanian, dan kehutanan.

Emisi Karbon di Indonesia disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi untuk pembangkit Listrik dan alat transportasi. Selain itu, sektor pertanian dan kehutanan merupakan penyumbang terbesar emisi di Indonesia salah satunya kebakaran hutan dan lahan.

Komitmen Prabowo dan Gibran untuk *net zero emission* salah satunya mempersiapkan pembangkit listrik tenaga uap akan berhadapan langsung dengan pengusaha-pengusaha batu bara yang ada di dalam tim pemenangannya seperti Wishnu Wardhana dan Erwin Aksa. Selain itu, di sektor kehutanan, Indonesia ada 7 grup besar yang menguasai lahan mencapai 5,654 Juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua yaitu APP Sinarmas Grup, APRIL Grup, Kertas Nusantara, Marubeni, Alas Kesuma, Djarum Forestry dan Korindo & Oji Holdings.

Jikalahari menilai, misi ini akan sulit dijalankan oleh Prabowo dan Gibran karena ada banyak pengusaha industri ekstraktif di belakangnya, termasuk Prabowo sendiri. Beranikah Prabowo dan Gibran mengesampingkan kepentingan orang-orang yang mendukung mereka demi mewujudkan *net zero emission* Indonesia?

Jikalahari menilai, Prabowo dan Gibran lebih berani terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dengan memberikan hukuman seberat-beratnya. Namun Jikalahari tidak menemukan pernyataan akan mencabut ataupun mereview perizinan korporasi yang nyata telah melakukan pengrusakan ataupun kejahatan lingkungan.

Prabowo dan Gibran juga tidak berani dengan tegas menyuarakan untuk memberikan ruang Kelola (Perhutanan Sosial dan TORA) kepada masyarakat, terutama masyarakat adat. Padahal Prabowo dan Gibran membawa isu akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Program Perhutanan Sosial dan TORA merupakan salah satu program andalan Presiden Jokowi sejak terpilih pada 2014.

Jikalahari menilai visi dan misi Prabowo dan Gibran terkait isu lingkungan dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, namun apakah Prabowo berani mengimplementasikannya?

### C. Ganjar Pranowo – Mahfud MD

Ganjar Pranowo resmi menjadi capres setelah ditetapkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, pada 21 April 2023 yang dihadiri oleh elit PDIP, dan juga Presiden Jokowi<sup>22</sup> di Istana Batutulis, Bogor.

Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah 28 Oktober 1968 ini merupakan anak polisi letnan satu dan ibunya adalah seorang pedagang warung kelontong. Ganjar menempuh Pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1987. Ia bergabung dan aktif dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) karena mengagumi sosok Soekarno. Kemudian melanjutkan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Ganjar memulai karir politik sejak usianya 30 tahun, dari awal terbentuknya PDIP di masa reformasi, kemudian pernah menjadi anggota Komisi IV DPR RI tahun 2004-2009 dan Wakil Ketua Komisi II tahun 2009 – 2013. Namanya mulai dikenal sejak ia terlibat dalam

<sup>22</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/5267431/ganjar-pranowo-resmi-ditetapkan-jadi-capres-pdip>

tim pengawas kasus Century dan menjadi wakil sekretaris Fraksi PDIP DPR RI periode 2010-2013.

Pada 23 Agustus 2013 Ganjar dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013 – 2018, kemudian kembali terpilih menjadi gubernur periode 2018 – 2023. Salah satu kegiatan Ganjar adalah memimpin 3 ribu pelajar yang menggelar aksi antikorupsi dan mengajaknya menempel stiker anti korupsi di sejumlah mobil dinas Pemrov Jateng. Kegiatan itu dilakukan bertujuan untuk pembenahan korupsi. Semasa ia menjabat, tingkat pelaporan LHKPN di Provinsi Jateng pada periode 2018 – 2022 selalu mencapai 100%.<sup>23</sup>

Pada 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Ganjar sebagai Capres dalam pemilihan umum 2024. Ganjar dibersamai Mahfud MD sebagai cawapres diusung PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.

Sedangkan wakilnya, Mahfud MD lahir di Sampang 13 Mei 1957, memiliki latar belakang keluarga pegawai kecamatan di Sampang. Ia menempuh Pendidikan sarjana di Fakultas Sastra dan Budaya UGM jurusan Sastra Arab, di waktu yang sama Mahfud juga menempuh pendidikan di Fakultas Hukum jurusan Hukum Tata Negara pada 1978. Semasa kuliah, Mahfud menjadi pemimpin redaksi dua majalah mahasiswa di UII dan aktif menulis di surat kabar umum, selain aktif menulis, Mahfud juga aktif di organisasi ekstra universitas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia kemudian mendapatkan gelar S2 Ilmu Politik dan S3 Ilmu Hukum Tata Negara di UGM.

Sejak tahun 1984, Mahfud juga dikenal sebagai staf pengajar dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian awal reformasi pada 2000 – 2001 Mahfud MD diangkat Presiden Abdurrahman Wahid menjadi menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.

Kemudian karir Mahfud MD semakin melejit kala menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008 hingga 2013, lalu pada 2019-2023 ia diangkat Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) pada kabinet Indonesia Maju.

Pasangan capres-cawapres, Ganjar – Mahfud mengusung visi *Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari*. Dalam dokumen visi-misi Ganjar – Mahfud terdapat beberapa penjabaran program strategis dalam pencapaian visinya.

Ganjar Pranowo – Mahfud MD menempatkan isu lingkungan menjadi program strategis menuju Indonesia Unggul dengan mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru.

Untuk melaksanakan visi-misinya, pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD akan melakukan penguatan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan menegakkan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan, termasuk *illegal logging*, *illegal fishing*, dan kebakaran hutan. Kemudian pengintegrasian penilaian risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, Governance, ESG*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan. Serta moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi.

<sup>23</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/ganjar-tempel-stiker-mobil-dinas-pemprov-nek-aku-korupsi-ora-slamet-1sPD94Zl6qt/3>

Kemudian ia akan melakukan penguatan ekosistem ekonomi hijau dengan mempercepat pencapaian target pembangun ekologi, sosial, dan tata kelola ESG bagi dunia sesuai dengan kesepakatan global.

Lalu pada misi mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, akan melakukan percepatan reforma agraria dan tata ruang yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam rangka tercapainya keadilan sosial dengan cara melindungi hak ulayat atas wilayah masyarakat adat, dan memberantas mafia tanah di perkotaan dan perdesaan.

Bijak Memilih merangkum rekam jejak dari masing-masing partai pendukung Ganjar-Mahfud terkait isu ekologis dan korupsi sebagai berikut<sup>24</sup>:

**Tabel 9. Rekapitulasi isu atau kasus yang melibatkan partai pendukung Ganjar - Mahfud**

Isu / Kasus	PDIP	PPP	Perindo	Hanura
Kursi di DPR Saat ini	128	19	0	0
Pengesahan UU IKN	Setuju	-	-	-
Pengesahan UU Cipta Kerja	Setuju	Setuju	-	-
Pembahasan RUU EB-ET	Setuju	Setuju	-	-
Pembahasan RKUHP	Setuju	Setuju	-	-
Pembahasan RUU KPK	Setuju	Setuju	-	-
Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK	Setuju	Setuju	-	-
Revisi UU ITE	-	Setuju	-	-
Kenaikan Harga BBM Subsidi	Setuju	Setuju	-	-
Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat	Setuju	Setuju	-	-
Anggota Partai Terlibat Kasus Suap & Gratifikasi	66 kasus	19 kasus	1 kasus	13 kasus
Total Suap & Gratifikasi	311 miliar	21,8 miliar	98 Juta	8,62 miliar
Kasus Korupsi Merugikan Keuangan Negara	2 kasus	1 kasus	-	1 kasus
Total Kerugian Negara	39,8 miliar	99,9 miliar	-	2,30 triliun

Beralih pada gagasan – gagasan Ganjar-Mahfud terkait isu ekologis dalam visi – misinya, Jikalahari mengaitkan penjabaran dari visi – misi Ganjar-Mahfud dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya Riau.

### 1. **Komitmen Pemberantasan Korupsi**

Korupsi masih belum bisa hilang, dan masih menjadi budaya di Indonesia. Korupsi menurut Asian Development Bank (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik maupun swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka.

<sup>24</sup> <https://www.bijakmemilih.id/partai>

Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara tidak sedikit juga dilakukan oleh pejabat publik, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya di segala sektor, salah satunya sektor SDA untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Di Riau, ada 20 korporasi korupsi kehutanan yang sudah 15 tahun belum dihukum bahkan belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal 20 korporasi ini disebutkan dalam proses persidangan Azmun Jaafar, Arwin AS (Siak), tiga kepala dinas kehutanan, serta Rusli Zainal. Korupsi yang dilakukan para terpidana menerbitkan IUPHHK-HT serta mengesahkan RKT di atas hutan alam telah merugikan keuangan negara dan menguntungkan kedua puluh korporasi tersebut sebesar Rp 1,3 triliun.

Ganjar-Mahfud menempatkan komitmen pemberantasan korupsi ada pada misi ke 7 yaitu mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supermasi hukum, dan keamanan profesional terpercaya— reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam (SDA). Untuk mencapai misi ini, Ganjar-Mahfud akan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Korupsi SDA yang bertanggungjawab kepada Presiden dengan fungsi melakukan kajian, identifikasi kasus dan agenda penyelesaiannya.

Dalam dokumen visi-misinya, narasi pemberantasan korupsi Ganjar-Mahfud masih terlihat normatif, belum menyinggung korporasi yang terlibat kejahatan korupsi khususnya SDA, Jikalahari menilai Ganjar-Mahfud tidak benar-benar berkomitmen memberantas korupsi. Apalagi partai pendukung Ganjar-Mahfud tercatat banyak terlibat kasus korupsi hingga merugikan negara Rp 2,8 triliun.

## 2. Karhutla

Pada 2023, karhutla kembali terjadi di Riau, Polusi asap akibat karhutla menyebabkan kualitas udara di Pekanbaru berada di level Tidak Sehat, berdasarkan data Satgas Karhutla Provinsi Riau hingga Desember 2023, luas karhutla di Riau berdasarkan data Sipongi KLHK mencapai 6.990 hektar. Polusi asap ini mengakibatkan 31 ribu orang terpapar infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

Selain itu karhutla juga terjadi pada 2015, berdasarkan data Sipongi KLHK menghanguskan lahan seluas 183.808 ha. Sekitar 107.000 ha lahan merupakan lahan gambut, sisanya lahan mineral, bahkan karhutla juga mengakibatkan lima warga Riau meninggal akibat menghirup kabut asap, tiga anak kecil dan dua orang dewasa, sekitar 97.139 warga menderita penyakit: infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), pneumonia, asma, iritasi mata, iritasi kulit.

Pada 2019 karhutla menurut data Sipongi KLHK, terjadi setidaknya menghanguskan lahan seluas 90.550 ha, lebih 300 ribu orang terpapar penyakit ISPA, dan tiga orang diduga meninggal, tidak hanya itu, negara juga mengalami kerugian sekitar 50 triliun.

Menilik kasus karhutla yang terjadi di Riau, dalam dokumen visi – misi Ganjar – Mahfud akan menegakkan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan disertai dengan peningkatan kapasitas aparat dan pelibatan masyarakat setempat.

*Apakah Ganjar – Mahfud berani menghukum perusahaan yang lahannya terbakar?*

Faktanya, aparat penegak hukum memiliki hubungan ‘spesial’ dengan korporasi pembakar hutan dan lahan. Mulai dari mensponsori penerbitan selebaran larangan membuka lahan dengan cara bakar, membantu pelatihan pemadaman api kepada anggota polisi hingga membangun Gedung Graha Tanoto STIK Lemdiklat Polri

Dampaknya independensi aparat penegak hukum menjadi bias dan pada akhirnya tidak ada Perusahaan terutama HTI yang ditetapkan sebagai tersangka karhutla. Seperti PT Arara Abadi terbakar pada Oktober 2023, lalu pada 2019 PT RAPP bersama PT Arara Abadi sudah disegel oleh Gakkum KLHK namun bebas dan tak kunjung jadi tersangka.

Dengan kondisi seperti ini, benarkah Ganjar-Mahfud bisa tegas dalam menindak pelaku pembakar hutan dan lahan?

### **3. Konflik Sosial dan Perampasan Hak Masyarakat**

Dalam misinya, Ganjar – Mahfud akan memberikan kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat melalui penatausahaan hak ulayat, baik yang beraspek publik maupun yang beraspek privat (hak komunal).

Konflik sosial dan tanah juga kerap terjadi di Riau. Catatan Jikalahari konflik tanah antara Masyarakat Adat Pantai Raja dengan PTPN V Kebun Sei Pagar sejak tahun 1984. PTPN V merampas dan membatas kebun karet masyarakat seluas 1013 hektar. Saat itu pihak PTPN V mengakui luas areal kebun karet masyarakat yang terkena kebun inti seluas 150 Ha, dan masyarakat minta lahannya dikembalikan untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada titik terang atas persoalan konflik tanah ini.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, Ganjar-Mahfud harus benar – benar progresif dalam mencapai misinya, ditambah lagi partai pendukungnya setuju untuk pembahasan RUU masyarakat adat. Latar belakang Mahfud yang mengerti persoalan hukum dan HAM diharapkan dapat menjadi penggerak untuk mendorong isu penyelesaian konflik ini dapat dilakukan.

### **4. Ekonomi Hijau Dengan Penerapan Ekologi, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)**

Pada tahun 2014, regulator utama lembaga jasa keuangan Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meluncurkan Roadmap atau peta jalan Keuangan Berkelanjutan Indonesia (2015-2019). Salah satu komponen utama dalam peta jalan ini adalah Peraturan OJK (POJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tahun 2017. Peraturan ini mewajibkan bank yang beroperasi di Indonesia menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan tahunan yang menunjukkan bagaimana bank mengelola risiko ESG terkait pembiayaan yang diberikan.

Salah satu misi Ganjar – Mahfud ialah pengintegrasian penilaian risiko ESG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan. Untuk penilaian risiko ESG ini maka Ganjar-Mahfud harus fokus pada PUSK yang memberikan pendanaan kepada perusahaan terlibat kejahatan lingkungan.

Faktanya, banyak perusahaan yang terlibat dalam karhutla 2019 telah menerima pendanaan dari PUSK dalam dan luar negeri setidaknya mencapai Rp 262 triliun (19 miliar USD) dalam bentuk utang dan penjaminan sejak 2015. China, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Jepang merupakan asal negara dari PUSK yang menyediakan fasilitas keuangan tersebut. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Maybank, dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan tiga penyandang dana individual yang terbesar.<sup>25</sup>

Dari fakta di atas, dapat dilihat bahwa PUSK berperan penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mendukung ekonomi hijau. Jika PUSK abai terhadap penilaian risiko ESG, dan terus memberikan pendanaan kepada perusahaan perusak lingkungan maka ekonomi hijau yang di gadang-gadangkan Ganjar-Mahfud hanya angan-angan semata.

### 5. Energi Terbarukan

Ganjar-Mahfud dalam misi penguatan mitigasi dan penanganan perubahan iklim serta bencana menempatkan energi baru terbarukan menjadi sebagai program strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap penanggulangan perubahan iklim dengan mempercepat transisi energi yang difokuskan pada percepatan pemanfaatan energi terbarukan.

Secara garis besar hal ini mengedepankan inovasi dan membawa angin segar. Namun Ganjar-Mahfud harus lebih teliti dan jangan sampai salah kaprah. Sebab berdasarkan RUU EB-ET—RUU untuk mempercepat transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan—hal yang paling dianggap kontroversial adalah dalam RUU ini produk turunan batu bara dikategorikan sebagai energi 'baru'. Belum lagi adanya indikasi sumber energi biomass berasal dari HTI hanya dijadikan greenwashing untuk menggundulkan hutan Indonesia. RUU ini didukung oleh dua partai pendukung Ganjar-Mahfud.

### 6. Ruang Kelola Masyarakat

Terkait ruang Kelola masyarakat ini tertuang dalam misi ke empat Ganjar – Mahfud yaitu mempercepat pemerataan Pembangunan ekonomi. Ganjar akan melakukan percepatan Reforma Agraria dan Tata Ruang yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam rangka tercapainya keadilan sosial.

Untuk merealisasikan hal ini, maka Ganjar-Mahfud harus berjuang mengakomodir hak-hak Kelola masyarakat melalui skema PS dan TORA. Kenyataannya areal-areal ini telah dimonopoli oleh Perusahaan HTI dan sawit.

Hal tersebut menyebabkan realisasi PS di Riau lambat, hingga kini baru mencapai sebesar 13% dari yang dialokasikan seluas 1,3 juta ha. Persoalan lainnya, konflik antara masyarakat dan perusahaan masih terus berlangsung. Ditambah lagi potensi areal potensi PS yang ada justru diusulkan oleh Gubernur Riau menjadi PBPH. Lantas, apakah Ganjar dapat menjalankan misinya dan mampu mempercepat realisasi reforma agraria?

<sup>25</sup> [https://www.ran.org/wp-content/uploads/2019/12/Sustainable\\_Finance\\_Report2019.pdf](https://www.ran.org/wp-content/uploads/2019/12/Sustainable_Finance_Report2019.pdf)

## 7. Deforestasi dan kerusakan Hutan

Tutupan hutan di Riau terus berkurang setiap tahunnya. Penyebab berkurangnya tutupan hutan antara lain, pengelolaan hutan secara intensif pada areal HTI, konversi kawasan hutan untuk penggunaan oleh sektor lain, seperti perluasan pertanian, perkebunan dan pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar; perambahan dan okupasi lahan pada kawasan hutan serta kebakaran hutan.

Jika dipersentasekan maka deforestasi pada kawasan HTI memiliki persentase yang paling besar di antara perkebunan sawit ataupun kawasan konservasi yaitu sekitar 29,23%. Kawasan konservasi menduduki peringkat persentase kedua terbesar setelah deforestasi HTI sekitar 22,98%.

Kasus ini sesungguhnya sejalan dengan misi yang dinyatakan Ganjar-Mahfud—moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. Untuk menjalankan misi ini, Ganjar-Mahfud harus berani menyatakan ‘perang’ terhadap perusahaan HTI dan sawit dengan mencabut atau mengurangi izin Perusahaan. Ini langkah lebih riil untuk mempercepat pengembalian tutupan hutan demi lingkungan hidup yang Lestari.

Namun, beranikah Ganjar-Mahfud menyatakan mencabut atau mengevaluasi izin Perusahaan HTI dan sawit?

Jikalahari menilai, Ganjar-Mahfud masih belum berani dengan tegas menyatakan ‘perang’ terhadap korporasi yang nyata merupakan sumber dari segala persoalan LHK yang terjadi. Dalam visi misinya, Ganjar-Mahfud memang mendorong adanya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, namun tidak berani dengan tegas menyatakan akan menegakkan hukum dan memberantas korupsi terhadap korporasi yang terlibat persoalan LHK. Ganjar-Mahfud dalam Misinya hanya mengatakan ‘Menegakkan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan disertai dengan peningkatan kapasitas aparat dan pelibatan masyarakat setempat’.

Ganjar-Mahfud juga tidak berani dengan tegas menyuarakan untuk memberikan ruang Kelola kepada masyarakat, terutama masyarakat adat dan menyatakan ‘perang’ terhadap perusahaan yang berkonflik dan penyebab deforestasi.

Dalam misinya, Ganjar-Mahfud hanya menyatakan melakukan percepatan Reforma Agraria dan Tata Ruang yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam rangka tercapainya keadilan sosial, dan moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi tanpa menjeru ke penyebab deforestasi sesungguhnya.

Untuk itu, Jikalahari menilai Ganjar belum progresif dalam visi misinya untuk menyatakan perang dengan perusak lingkungan, dan belum tegas akan memberikan ruang kelola untuk masyarakat, terutama masyarakat adat dan pada akhirnya tidak akan menyelesaikan akar masalah lingkungan yang ada di Indonesia, khususnya Riau.

#### IV. Kebijakan Ekologis di 2023, Dilanjutkan atau Diubah oleh 3 Kandidat Capres?

Sejak Anies Baswedan mendeklarasikan Partai Nasdem menjadi calon presiden Partai Nasdem pada Oktober 2022, Partai Nasdem mendeklarasikan dan kemudian membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) kata perubahan terus didengungkan. Belakangan PD keluar karena Anies dan Nasdem memilih Muhaimin Iskandar dan menjadikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi anggota koalisi baru.

Diseberang arena, tokoh potensial calon presiden, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terus menggaungkan keberlanjutan. Mereka seolah berebut menjadi pihak yang paling berhak menjadi penerus Jokowi. Meski akhirnya Ganjar yang saat ini berpasangan dengan Mahfud MD didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo, sedikit mengubah premisnya, keberlanjutan dengan evaluasi.

Sementara Prabowo semakin mantab dengan slogan keberlanjutan setelah menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan dukungan Partai Gerindra, Partai Golkar, PD, Partai Amanat Nasional (PAN) dan beberapa partai non parlemen.

*Lalu bagaimana sebenarnya isi dari jargon-jargon tersebut?*

Untuk melihat apa yang akan diubah dan apa yang hendak dilanjutkan, setidaknya melalui bedah visi-dan dari misi masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden kita bisa menemukan kesahihan makna keberlanjutan maupun perubahan. Setidaknya terhadap kebijakan yang lahir di tahun 2023 bidang isu lingkungan hidup dan kehutanan, mulai dari Undang-undang hingga kepada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Selama 2023, terdapat beberapa isu, mulai dari UU Cipta Kerja, Keuangan berkelanjutan, percepatan perhutanan sosial, percepatan pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian sawit dalam kawasan hutan dan perdagangan karbon.

Bagaimana pandangan masing-masing kandidat?

##### 1. Undang-undang Cipta Kerja

Sejak UU Cipta Kerja ditetapkan pertama kali pada 2 November 2020 dan kemudian versi terbaru masih menjadi sumber masalah. Terdapat banyak persoalan, dari mulai formil yang bermasalah hingga materil yang banyak mengistimewakan para korporasi HTI dan Sawit yang selama ini menjadi penyebab permasalahan lingkungan dan konflik di masyarakat.

Korporasi mendapatkan keistimewaan di mana izinnya menjadi 90 tahun dan dapat diperpanjang, sehingga total 180 tahun, sedangkan korporasi sawit yang selama ini menebang hutan lalu diubah menjadi kebun sawit mendapat keistimewaan dengan menghilangkan sanksi pidana. Lalu bagaimana posisi visi-misi capres cawapres?

*Anies-Muhaimin:*

Dalam Dokumen visi-misi Anies tidak terdapat secara eksplisit rencana untuk merevisi atau mencabut UU Cipta Kerja. Meskipun di berbagai media masa Anies kerap menyebut untuk merevisi UU Cipta Kerja. Tentu sulit meyakinkan apakah Anies-Muhaimin akan merevisi UU Cipta Kerja, apalagi 2 partai pendukung Anies-Muhaimin Nasdem dan PKB adalah partai yang menyetujui UU Cipta Kerja.

*Prabowo-Gibran:*

Tidak terdapat rencana mencabut atau bahkan merevisi dalam visi-misi pasangan Prabowo-Gibran. Juga tidak pernah ada rencana untuk revisi UU Cipta Kerja dalam media masa dan dalam dialog-dialog publik. Justru sejak awal UU Cipta Kerja, Prabowo aktif mengonter pihak-pihak yang menolak UU Cipta Kerja. Di samping itu, Prabowo Gibran juga diusung partai pendukung UU Cipta Kerja termasuk ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang membentuk tim satgas penyusun UU Cipta Kerja.

*Ganjar-Mahfud:*

Visi-misi Ganjar-Mahfud tidak terdapat secara eksplisit rencana untuk merevisi atau mencabut UU Cipta Kerja. Meskipun Ganjar dalam media masa, saat bertemu buruh menyebut akan merevisi UU Cipta Kerja. Dibalik itu, pasangan Ganjar-Mahfud didukung PDIP yang menjadi partai terbesar yang mendorong disahkannya UU Cipta Kerja.

## 2. Keuangan Berkelanjutan

Pada 12 Januari 2023, Presiden Jokowi menetapkan UU No. 4 Tahun 2023 Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. UU ini sangat penting untuk menghentikan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Pasalnya selama ini korporasi pelaku perusakan hutan dan lingkungan terus beroperasi dengan pendanaan dari PUSK baik dalam maupun luar negeri.

Undang-undang ini memiliki satu bab khusus yang mengatur mengenai keuangan berkelanjutan. Dari keuangan berkelanjutan dalam UU PPSK ini, terdapat dua hal penting, pertama mengenai Taksonomi Hijau, yang saat ini dikembangkan menjadi Taksonomi berkelanjutan. Ke dua mengenai ESG.

OJK sebelumnya telah menerbitkan Taksonomi Hijau sebagai panduan dalam keuangan berkelanjutan. Taksonomi Hijau didefinisikan sebagai klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Terdapat tiga klasifikasi dalam penilaian aktivitas ekonomi, hijau, kuning dan merah. Di mana warna “Hijau” berlaku untuk sektor usaha yang melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan. “Kuning” diberikan pada sektor yang dianggap melindungi lingkungan apabila memenuhi standar tertentu. Adapun “Merah” mencakup sektor usaha yang tidak memenuhi standar ramah lingkungan.

UU PPSK mengamanatkan untuk mengatur taksonomi berkelanjutan dalam peraturan pemerintah. Namun temuan Jikalahari saat ini, pembahasan Taksonomi Berkelanjutan mengalami penurunan kualitas dan lebih tinggi risiko di mana hanya mengklasifikasi pada warna hijau dan kuning. Di mana “Hijau” berlaku untuk sektor usaha yang melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan, sedangkan kuning adalah sektor usaha yang sedang dalam proses menuju hijau dalam waktu tertentu.

Selain Taksonomi Berkelanjutan, yang juga penting untuk mendorong keuangan berkelanjutan ialah PUSK turut berperan dan mendukung upaya pencapaian SDGs melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan aspek ESG dalam operasionalnya. ESG dikenal sebagai salah satu parameter pelaksanaan pembangunan SDGs. Aspek ESG merupakan konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan/investasi/bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor utama, yaitu lingkungan, sosial dan tata kelola. Artinya segala bentuk aktivitas maupun pengambilan keputusan perusahaan jasa keuangan

hendaknya juga dapat menerapkan secara penuh prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik.

Pertama, *Environment*: Faktor lingkungan di mana perusahaan mempertimbangkan dampak operasional bisnis terhadap lingkungan dan peran perusahaan sebagai pengurus lingkungan. Unsur lingkungan meliputi: Penggunaan energi ramah lingkungan; Pengelolaan limbah agar tidak menjadi polutan; Partisipasi dalam konservasi sumber daya alam tak tergantikan; Perlakuan wajar terhadap binatang yang tidak semena-mena; dan Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan risiko lingkungan.

Kedua, *Social*: Faktor sosial di mana perusahaan mempertimbangkan hubungan dan reputasi perusahaan terhadap stakeholder-nya dan bagaimana perusahaan membina stakeholder-nya (masyarakat, komunitas, supplier, konsumen, karyawan dan pihak terkait dari Perseroan). Unsur sosial meliputi: Pemilihan pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktik ESG; Keterlibatan organisasi dalam pembangunan komunitas baik dalam bentuk persentase laba dan/atau kerja sukarela para karyawan bagi komunitas; Kepastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan; Kepastian untuk mempertimbangkan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi.

Ketiga, *Governance*: Faktor tata kelola di mana perusahaan mempertimbangkan prinsip tata kelola perusahaan dalam mengatur dirinya sendiri. Unsur tata kelola meliputi:

Bagaimana para Capres merespon kebijakan ini? Termasuk bagaimana keuangan berkelanjutan dapat mengatur dan membuat korporasi berhenti merusak hutan dan lingkungan.

*Anies-Muhaimin:*

Anies memasukkan misi ekonomi hijau, di mana pembangunan berkelanjutan, integrasi indeks ekonomi hijau dalam persyaratan perizinan yang akan dijadikan basis evaluasi risiko sektor keuangan serta pembiayaan disektor hijau menjadi hal yang diutamakan Anies-Muhaimin dalam rencana kerjanya.

Disamping itu, dalam misi ke dua, dalam pengelolaan SDA berkelanjutan, Anies-Muhaimin menyatakan akan meningkatkan praktik ESG dalam pengelolaan SDA. Hal ini merupakan hal yang menarik dan menjadi peluang yang baik dalam mendorong perbaikan ekonomi yang sejalan dengan perlindungan lingkungan.

*Prabowo Gibran:*

Visi-misi Prabowo-Gibran tidak memuat sektor keuangan berkelanjutan. Dalam misinya menyebut terkait ekonomi hijau, berkomitmen untuk menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.

*Ganjar-Mahfud:*

Pasangan Ganjar-Mahfud memiliki misi lingkungan hidup berkelanjutan di mana salah satunya disebutkan melalui pengintegrasian penilaian risiko ESG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan.

### 3. Percepatan PS dan TORA

Salah satu kebijakan yang cukup baik di era Jokowi. Pada 2023 PS dan TORA dipercepat dengan diterbitkannya perpres yaitu Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Namun di Riau capaian keduanya masih rendah pada kisaran 13,6% dari yang dialokasikan. Selain itu, izin yang sudah terbit belum berjalan dengan baik sehingga belum begitu terasa dampak secara ekonomi bagi masyarakat.

#### *Anies-Muhaimin:*

Mendorong penguatan perbaikan tata kelola kehutanan dan mempercepat pengelolaan hutan oleh masyarakat, memulihkan ekosistem yang terdegradasi, upaya restorasi kawasan lindung serta perlindungan terhadap satwa dan flora yang terancam punah adalah beberapa di antara poin yang ingin dikerjakan Anies-Muhaimin. Anies-Muhaimin juga mendorong percepatan redistribusi tanah dalam misi pembangunan Kota dan Desa.

#### *Prabowo-Gibran:*

Tidak ada secara eksplisit menyebut PS dan TORA, juga pengelolaan hutan bagi masyarakat. Dalam visi-misinya Prabowo-Gibran menyatakan menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan.

Prabowo-Gibran mendorong pencegahan deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi-pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

#### *Ganjar-Mahfud:*

Misi ke empat Ganjar – Mahfud—mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi—Ganjar akan melakukan percepatan reforma agraria dan tata ruang yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam rangka tercapainya keadilan sosial. Ganjar-Mahfud juga menyebut, penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah

### 4. Penyelesaian Sawit dalam Kawasan Hutan

Persoalan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan adalah buah dari implementasi UU Cipta Kerja yang menguntungkan korporasi sawit. Mereka selama ini mendapatkan keuntungan dari menanam sawit dalam kawasan hutan, lalu hendak diampuni. Lalu bagaimana masing-masing capres-cawapres dalam visi-misinya?

#### *Anies-Muhaimin:*

Tidak ada berkaitan dengan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan. Pasangan Anies-Muhaimin lebih berfokus pada kualitas sawit serta kesejahteraan pekebun sawit.

#### *Prabowo-Gibran:*

Tidak ada berkaitan dengan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan dalam visi-misi Prabowo Gibran. Prabowo-Gibran lebih berfokus pada penggunaan sawit sebagai sumber energi biodiesel dan bio-avtur.

*Ganjar-Mahfud:*

Pasangan Ganjar Mahfud tidak menyebut sektor sawit dalam visi-misinya.

## 5. Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon telah masuk ke dalam bursa karbon Indonesia. Ini juga bagian dari UU PPSK. Terdapat kekhawatiran akan adanya monopoli perdagangan karbon, mengingat belum ada regulasi yang pasti tentang masyarakat bisa ikut andil dalam perdagangan karbon.

*Anies-Muhaimin:*

Dalam visi-misinya, pasangan Anies-Muhaimin akan menyiapkan regulasi untuk produk rendah karbon dan menjadikan pemerintah sebagai konsumen utama produk rendah karbon dalam kegiatan pembangunan;

*Prabowo-Gibran:*

Tidak spesifik menyebut perdagangan karbon. Prabowo-Gibran mendukung akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission. Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau.

*Ganjar-Mahfud:*

Tidak ada secara eksplisit tentang perdagangan karbon dalam visi-misi Ganjar-Mahfud. Ganjar-Mahfud berfokus pada ekonomi hijau dan biru.

## V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari analisis yang Jikalahari lakukan terhadap visi-misi kandidat calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pemilu mendatang, tidak ada yang benar-benar berkomitmen terhadap isu ekologis. Narasi – narasi normatif seperti mendorong, memperkuat ataupun menghukum seberat-beratnya, bertebaran dalam dokumen visi-misi, namun tidak ada yang berani konkrit menyatakan, akan melawan korporasi ataupun taipan yang terlibat dalam perusakan lingkungan.

Para kandidat capres dan cawapres hanya menyinggung persoalan di hilir, tanpa sedikit pun melirik apa problem hulu yang menjadi akar masalah dari persoalan lingkungan yang ada di Indonesia. Monopoli korporasi dan longgarnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

Jikalahari menggunakan 4 parameter dalam menilai keseriusan para kandidat menyelesaikan persoalan ekologis di Indonesia, terkhususnya Riau. Hasil dari analisis sebagai berikut:

Parameter	Anies – Muhaimin	Prabowo – Gibran	Ganjar – Mahfud
Berani dan tegas menyatakan akan mencabut/ mereview perizinan perusahaan yang terlibat kasus LHK	<b>Tidak berani</b> AMIN hanya menyatakan memperkuat penegakan hukum lingkungan	<b>Tidak berani</b> Mereka cukup berani menyatakan akan menghukum seberat-beratnya pemilik perusahaan yang terlibat kasus LHK. Namun narasi ini lebih	<b>Tidak berani</b> Ganjar – Mahfud tidak menjelaskan secara spesifik pandangannya terhadap sanksi perusakan lingkungan

		menitik beratkan pada sanksi pidana, yang di dalamnya belum tentu diputuskan akan mencabut izin perusahaan	
Menyatakan keberpihakan dan akan memberikan akses ruang kelola kepada masyarakat	<b>Tidak Spesifik</b> AMIN menyatakan akan mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dengan melibatkan Masyarakat.	<b>Tidak Berani</b> Prabowo – Gibran tidak tegas menyuarakan memberikan ruang Kelola (Perhutanan Sosial dan TORA) kepada masyarakat, terutama masyarakat adat. Padahal Prabowo dan Gibran membawa isu akan melanjutkan program Presiden Jokowi.	<b>Tidak Berani</b> Keduanya mendorong percepatan Reforma Agraria dan Tata Ruang yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam rangka tercapainya keadilan sosial. Namun tidak dengan tegas menyatakan akan diberikan kepada masyarakat
Berkomitmen dalam penyelenggaraan tata kelola Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST)	<b>Tidak Konkrit</b> Walaupun dalam rencana kerjanya, AMIN menjelaskan rencana-rencananya berkaitan dengan Pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan LST, AMIN masih belum tegas menysasar sektor pendanaan untuk lebih selektif dalam memberikan pendanaan dengan memperhatikan evaluasi risiko lingkungan	<b>Tidak ada</b>	<b>Tidak konkrit</b> LST atau ESG menjadi salah satu isu prioritas pasangan ini, namun mereka hanya fokus di kulit luar tanpa menganalisis lebih dalam. Pencapaian target LST tidak hanya jadi alat manuver mengikuti pasar global, namun juga harus memperhatikan evaluasi risiko lingkungan dari sektor pendaan yang berikan bantuan dana pada Perusahaan bermasalah
Berani dan tegas untuk menghukum para taipan ataupun korporasi yang terlibat kasus LHK.	<b>Tidak berani</b> Tidak ada narasi dan sikap tegas yang disampaikan AMIN baik dalam visi – misi atau pun debat menyoal hal ini.	<b>Berani</b> Satu-satunya kandidat yang berani menyatakan akan menghukum seberat - beratnya pemilik usaha yang melakukan kejahatan lingkungan.	<b>Tidak berani</b> Tidak ada narasi dari pasangan ini berkaitan dengan menghukum taipan ataupun korporasi yang merusak lingkungan.

Menilik sikap dari para kandidat Capres dan Cawapres terkait parameter yang digunakan, Jikalahari merekomendasikan agar:

1. Para kandidat berkomitmen untuk mencabut/review izin perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan. Monopoli kawasan yang dilakukan oleh para korporasi ini telah menjadi penyebab utama berbagai masalah lingkungan terjadi.
2. Para kandidat berkomitmen untuk mengembalikan hutan tanah ke masyarakat adat dan tempatan dan menjamin hak mereka untuk mengelola hutan tanah ini. Langkah ini juga menunjukkan keberpihakan para kandidat untuk menekan laju krisis iklim yang terjadi dengan melibatkan masyarakat.
3. Isu ESG/ LST sebaiknya dipahami secara mendalam oleh para kandidat terutama terkait evaluasi risiko lingkungan yang dapat digunakan sebagai baseline penilaian untuk memberikan bantuan pendanaan kepada Perusahaan. Tanggungjawab Lembaga keuangan terhadap dana yang dikucurkan harus penuh, sehingga dapat menekan mereka untuk benar – benar memberikan pendanaan pada kegiatan yang tak miliki risiko pengrusakan lingkungan.
4. Kandidat harus berkomitmen dan dengan lantang menyuarakan keadilan dalam penegakan hukum terhadap taipan ataupun korporasi terkait kasus LHK. Menjaga integritas dan keberpihakan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan lingkungan harus diutamakan. Kedekatan para taipan dan korporasi dengan aparat penegakan hukum harus diberantas demi terwujudnya keadilan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jangan hanya tajam ke Masyarakat, namun amat sangat longgar terhadap korporasi dan taipan.

####